

POLITIK IDENTITAS SUNDA:
Pergulatan Ideologi Kebudayaan dan Politik Kekuasaan
(Studi terhadap Dua Organisasi Sosial Kesundaan
Di Jawa Barat)

Laporan Penelitian

Mendapat Bantuan Dana dari DIPA-BOPTAN UIN SGD Bandung
Tahun Anggaran 2013



Oleh :
Husnul Qodim, M.A.
NIP. 197702242006041001

LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
1434 H/2013

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami politik identitas sunda dan bagaimana mereka mengekspresikan identitasnya dalam pergulatan kebudayaan dan politik kekuasaan di era pasca reformasi.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan sebagai subjek penelitian adalah dokumen-dokumen, buku-buku, majalah dan kliping koran terkait dua organisasi social kesundaan, yaitu Paguyuban Pasundan dan Duta Sawala Barisan Olot Tatar-Sunda (BOTS). Penelitian ini berusaha untuk memahami fenomena sosial dan budaya, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini lebih difokuskan pada ekspresi pergulatan kebudayaan dan politik dari kedua organisasi tersebut yang berusaha merepresentasikan diri sebagai perwakilan masyarakat Sunda.

Hasil dari penelitian ini menemukan adanya beberapa fakta. Meskipun, sama-sama memiliki tujuan untuk memajukan masyarakat Sunda di Jawa Barat agar mencapai kesejahteraan, namun keduanya memiliki strategi dan langkah yang berbeda dalam upaya politik identitas Kesundaan. Paguyuban Pasundan merupakan organisasi yang berkonsentrasi pada aspek pendidikan, dan pernah mengalami kegagalan ketika terlibat langsung dalam politik praktis (menjadi Partai). Sedangkan Duta Sawala Barisan Olot Tatar Sunda, memilih untuk memperjuangkan hak-hak kultural masyarakat Sunda melalui keterlibatannya dalam politik praktis, dengan memposisikan anggotanya menjadi anggota legislative di DPR RI melalui Partai Nasional Demokrat sebagai pilihan politiknya.

Kata-kata Kunci: Politik Identitas, Ideologi, Politik, Kebudayaan, Kesundaan, Masyarakat Sunda.

BAB I. PENDAHULUAN

POLITIK IDENTITAS SUNDA: Pergulatan Ideologi Kebudayaan dan Politik Kekuasaan (Studi terhadap Dua Organisasi Sosial Kesundaan Di Jawa Barat)

1.1. Latar Belakang Masalah

Di masa lalu, sebelum reformasi, keragaman budaya di Indonesia diakui sesuai dengan semboyan kebangsaan ‘Bhineka Tunggal Ika’, namun tidak satupun hak politik yang diperbolehkan dibangun diatas perbedaan budaya dan etnis. Keragaman budaya bangsa, seringkali dimaknai secara simbolik dan abstrak dalam wujud pakaian dan rumah adat yang dipertontonkan. Padahal di dalam keragaman budaya dan etnik tersebut mengandung keragaman ideologis terkait cara pandang hidup, rentetan keyakinan, nilai-nilai, ekspresi dan angan-angan sosial yang beragam.

Konsep *negara-bangsa* di Indonesia, yang terdiri dari 30 ribu pulau dengan 656 suku, digambarkan telah menjelma menjadi sebuah negara “persatuan dan kesatuan” Indonesia. Istilah SARA yang sebenarnya bermakna netral, namun oleh penguasa saat itu digambarkan sebagai pertentangan atau konflik di dalam masyarakat dan merupakan ancaman terhadap

stabilitas nasional. Berbagai kajian, diskusi dan perdebatan argumentatif menyangkut SARA dilarang.¹ Padahal, perbedaan tidak selalu bermakna pertentangan, apabila dikaji dan dikelola dengan baik akan bermakna menjadi kekayaan khazanah sebuah bangsa.

Setelah era reformasi, saat dimana suasana kebebasan politik telah mendapatkan momentumnya, kelompok-kelompok sosial, politik, agama, dan budaya yang telah mengalami tekanan politik di masa lalu, mulai mengekspresikan kebangkitan identitas kelompoknya masing-masing. Kebangkitan kelompok-kelompok agama misalnya, ditandai dengan munculnya kembali diskursus “radikalisasi agama”, dan “fundamentalisme agama”². Di era reformasi, kelompok-kelompok militan Islam seperti Majelis Mujahidin, Laskar Jihad, Gerakan Usroh, Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam,

¹ Stanley Prasetyo Adi, Artikel “Semangat Kemajemukan Versus Ideologi Pembangunan” dalam buku *Dari Keberagaman Menuju Keseragaman: Wacana Multikultural dalam Media*, Sandra Kartika (editor), (Jakarta: LSPP, 1999), hal. 151.

² Ada yang membaca ini merupakan fenomena baru dari kelanjutan kebangkitan Islam dalam merespon arus globalisasi dan modernisasi sebagai “kekuatan hegemonik Barat atas Islam”. Di sisi lain, ada yang mengasumsikan bahwa munculnya gerakan ini lebih disebabkan oleh kelanjutan ideologi keagamaan yang mengusung proyek otentifikasi dan universalisme Islam yaitu “salafisme”. Lihat [Husnul Qodim, *Dinamika Salafisme Di Pesantren Indonesia: Jaringan, Transmisi Pengetahuan Dan Transformasi Sosial Yang Beragam*, (Yogyakarta: Tesis, CRCS-UGM, 2005), hal. 1-2].

HAMMAS dan Gerakan Dakwah Salafi³, mulai bangkit mengekspresikan identitas ideologi keagamaannya, bahkan diantaranya mulai mempertanyakan kembali ideologi negara. Perubahan politik di era reformasi, juga diikuti oleh semakin meningkatnya kelompok-kelompok organisasi sosial dan politik di Indonesia. Jumlah partai politik meningkat dari tiga partai peserta pemilu terakhir masa Orde Baru pada 1997, menjadi empat puluh delapan partai peserta pemilu. Demikian juga kelompok-kelompok sosial, menurut laporan Hadiwinata, jumlah organisasi non-pemerintah (LSM dan Ormas) mengalami peningkatan delapan kali lipat antara 1996 dan 2000.⁴

Momentum reformasi ini juga mendorong munculnya kebangkitan kelompok-kelompok kebudayaan dari berbagai suku dan adat di Indonesia, yang menegosiasikan kembali hak-hak politik, eksistensi kebudayaan dan sumber daya alam di wilayah mereka. Kebangkitan identitas kelompok suku dan

³ Lihat juga, [Husnul Qodim, artikel utama “*Dinamika Salafisme Di Indonesia: Akar Intelektualitas Dan Orientasi Ideologis Yang Beragam*”, dalam Jurnal Taswirul Afkar: Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Edisi No. 21 Tahun 2007, hal. 46-48].

⁴ (Hadiwinata 2003:1) dikutip dari David Henley dan Jamie Davidson, “Pendahuluan: Konservatisme radikal-Aneka Wajah Politik Adat”, dalam Jamie Davidson dkk., (Ed.), *Adat dalam Politik Indonesia*, penterjemah: Emilius Ola Kleden dan Nina Dwisasanti, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor dan KITLV Leiden, 2010), hal 19.

adat di Indonesia mewujud dalam bentuknya yang beragam, bergantung pada persoalan yang dihadapi oleh masing-masing kelompok tersebut. Konggres Masyarakat Adat Nusantara yang pertama di Jakarta tahun 1999, yang telah berhasil melahirkan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), menjadi pertanda awal kebangkitan adat di Indonesia. Konggres yang dihadiri oleh lebih dari dua ratus perwakilan komunitas masyarakat adat dari Aceh sampai Papua, membuat pernyataan yang keras terhadap Negara, yaitu tidak akan mengakui negara kalau negara tidak mengakui mereka. Mereka juga menuntut pengembalian seluruh tanah adat kepada komunitas masyarakat adat dan penghapusan lembaga orde baru (LMD dan LKMD) di tingkat pemerintahan desa untuk digantikan dengan lembaga adat.⁵

Apa itu identitas? Menurut Eisenberg dalam *Reason and Identity* (2009), merujuk pada loyalitas seseorang terhadap kelompok sosial tertentu yang mempunyai cara hidup, serentetan keyakinan yang berperan sangat penting bagi konsepsi diri mereka. Secara sosiologis identitas personal melahirkan identitas kelompok yang bisa membentuk *in-group feeling* dan *out-group feeling* dalam proses penciptaan batas-

⁵ David Henley dan Jamie Davidson, “Pendahuluan: Konservatisme radikal-Aneka wajah politik Adat”..., hal. 19.

batas identitas mereka dengan yang lain.

Pembahasan mengenai identitas, saya anggap penting dan relevan karena dua hal: pertama, disadari atau tidak dalam proses hubungan sosial pada hakikatnya manusia setiap saat membangun identitasnya masing-masing dalam sebuah komunitas atau kelompok. Kedua, identitas sebuah masyarakat dikonstruksi secara terus menerus melalui pengalaman hidup di dalam kelompok sosialnya dan juga hubungannya dengan dunia diluarnya, baik kelompok sosial yang lain dan kekuasaan negara. Dikatakan oleh Bowie, antropolog, bahwa identitas sebuah masyarakat dikonstruksi secara terus menerus melalui pengalaman hidup di dalam dan ketika berinteraksi dengan dunia⁶. Ini berarti bahwa sepanjang manusia berhubungan dan bergaul sehari-hari dengan yang lain maka sesungguhnya sedang mengkonstruksi identitasnya.

Sedangkan politik identitas, menurut Denton dalam *Studies Identity in the 2008 Presidential Election* (2010), adalah politik yang didasarkan pada kelompok yang merepresentasikan kepentingan mereka ketimbang kelompok lainnya. Sebaliknya, identitas politik adalah posisi dan sikap politik yang terfokus pada kepentingan kelompok sosial

⁶ Fiona Bowie, *The Anthropology of Religion*. (Oxford Blackwell Publishers, 2001), hal. 71.

tertentu berdasarkan gender, agama, ras, etnisitas.

Menurut Dedy Jamaluddin Malik, dalam artikelnya “*Pilgub dan Politik Identitas*”,⁷ ada beberapa asumsi yang mendasari identitas politik. *Pertama*, anggota kelompok punya kesamaan sejarah yang hingga sekarang merasa terpinggirkan dan diasingkan. *Kedua*, pengalaman ketertindasan bersama adalah pertanda identitas dan menggantikan semua bentuk identitas lainnya. *Ketiga*, anggota kelompok adalah persekutuan anggota yang tangguh. Seperti komunitas Sunda misalnya, dari segi cultural, ekonomi dan politik, sejak Orde Baru merasa terpinggirkan dari pentas politik pusat.

Sedangkan terkait politik identitas adat, David Henley dalam “*Pendahuluan: Konservatisme radikal-Aneka Wajah Politik Adat*”⁸, berpendapat ada beberapa faktor yang mendasari kebangkitan identitas Adat di era reformasi ini, *Pertama*, adanya ‘tekanan politik di masa lalu’ yang membentuk pengalaman ketertindasan bersama telah menjadi latar belakang yang menentukan bagi munculnya kebangkitan identitas adat di Indonesia. *Kedua*, adanya inspirasi dan dukungan organisasi-organisasi internasional, baik gerakan yang berjuang bagi hak-hak masyarakat adat (*indigenous*

⁷ Koran Pikiran Rakyat, Senin 31 Desember 2012, hal.26.

⁸ Baca, David Henley dan Jamie Davidson, “*Pendahuluan: Konservatisme radikal-Aneka wajah politik Adat*”..., hal. 6-25.

peoples) untuk menuntut pengakuan hak-hak tradisional atas tanah dan hak menentukan nasibnya sendiri (gerakan *indigenisme* internasional), maupun gerakan pecinta lingkungan yang meyakini bahwa kearifan tradisi dan komunitas lokal dapat membantu melindungi lingkungan hidup. Asumsi kedua ini yang membuat mobilisasi itu berkembang demikian cepat dalam beragam bentuk tradisionalisme dan paham *indigenisme* yang mendadak muncul di era reformasi *Ketiga*, warisan-warisan ideologis, bersifat historis, dan terletak dalam peran yang telah dimainkan oleh adat dalam imajinasi sosial dan politik mereka di Indonesia. *Keempat*, yaitu peluang-peluang dan tuntutan penting dari reformasi yang terkait dengan sejarah politik dan ekonomi Indonesia belakangan ini. Berakhirnya sistem negara yang sentralistik, kebijakan desentralisasi dan munculnya UU Otonomi Daerah tahun 2000, memberikan kesempatan khusus bagi pembaruan kelembagaan adat di daerah-daerah. Namun berakhirnya negara yang sentralistik menjadi sebuah persoalan baru, berhubungan dengan pertanyaan siapa yang akan mengontrol dan mengendalikan sumber daya daerah yang kini dapat diakses. Oleh karena itu dalam konteks ini, sering kali adat bisa menjadi alat yang dimanfaatkan sebagai jalan untuk memperoleh posisi-posisi yang menguntungkan dalam

perebutan kekuasaan di daerah.

Demikian juga yang terjadi di Jawa Barat, politik identitas kesundaan ini mulai bangkit di era reformasi ini, baik dalam bentuk perdebatan wacana tentang kesundaan, semaraknya pagelaran seni tradisi Sunda di berbagai wilayah, dan munculnya organisasi-organisasi sosial yang merepresentasikan identitas adat (kesundaan) seperti Bamus Sunda, Paguyuban Pasundan, Barisan Olot Tatar-Sunda dan organisasi-organisasi kesundaan lainnya. Kesemuanya itu berhasrat mengonstruksi dan merepresentasikan identitas kesundaan yang sudah lama terabaikan dan termarginalkan. Persoalannya adalah identitas kesundaan yang bagaimana?

Sementara itu dalam politik kekuasaan di Indonesia, Partai-partailah yang sangat menentukan kepemimpinan baik di pusat pemerintahan maupun di daerah-daerah. Lagi pula, kriteria penentuan calon bukan diukur dari komitmen ideologis atau dukungan elit komunitas daerah (kesundaan kalau di Jawa Barat), melainkan diukur dari tingkat popularitas calon lewat hasil polling, lobi atau kadangkala transaksi. Lebih apes lagi, seringkali calon pemimpin *di-drop* dari pusat, yang biasanya justru tidak tahu menahu sosiologi politik daerah. Oleh karena itu kelompok-kelompok kesundaan terpaksa harus bersandar pada partai-partai, namun ada banyak juga kelompok

kesundaan yang sudah lama tak sabar dengan keadaan yang terpinggirkan dan menganggap bersandar pada partai adalah sia-sia karena tujuan partai dengan komunitas kesundaan berbeda. Komunitas-komunitas kesundaan berhasrat merepresentasikan identitas kesundaan dalam bentuknya yang ideologis dalam jangka panjang, sementara dalam politik kekuasaan partai-partai seringkali memanfaatkan identitas kesundaan sebagai alat pencitraan untuk memperoleh dukungan sementara. Membangun citra diri dengan identitas politik yang beraroma Sunda, menggunakan bahasa Sunda, pakaian dan asesoris etnik Sunda, seremoni dengan pagelaran seni tradisonal Sunda dan lain sebagainya yang hanya bersifat simbolik. Di sinilah, wawasan ideologis tentang kesundaan menjadi semakin penting untuk dipetakan dan dijadikan acuan untuk menghindari respon-respon sesaat dan emosional atas isu-isu yang sedang dihadapi.

Yang jelas identitas Sunda, baik dalam pergulatan ideologi kebudayaannya maupun dalam politik kekuasaan, menjadi identitas yang diperebutkan. Oleh karena itu, penelitian mengenai **Politik Identitas Sunda: Pergulatan Ideologi Kebudayaan dan Politik Kekuasaan** (Studi Terhadap Tiga Organisasi Sosial Kesundaan Di Jawa Barat) menjadi penting, untuk memeriksa bagaimana pergulatan

Institusi-institusi kesundaan menciptakan batas-batas ideologis identitas kultural Sunda?. Dan bagaimana dalam konteks politik kekuasaan, relasi dan afiliasi antara partai-partai dan komunitas-komunitas kesundaan dibangun dalam merepresentasikan identitas politik kesundaan?

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah penelitian yang dikemukakan diatas, ada masalah mendasar yang perlu dirumuskan, agar dapat memberikan arah yang jelas pada peneiliti. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada rumusan masalah yang diajukan, sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana latar belakang social historis berdirinya organisasi-organisasi sosial kesundaan di Jawa Barat?
- 1.2.2. Bagaimana dalam konteks politik kekuasaan, relasi organisasi-organisasi sosial kesundaan dan politik kekuasaan dalam merepresentasikan identitas politik kesundaan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Setidaknya terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini:

1.3.1.1. Untuk menjelaskan secara lebih mendalam mengenai pergulatan komunitas-komunitas kesundaan menciptakan batas-batas kultural identitas Sunda, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran secara ilmiah, khususnya studi mengenai kelompok-kelompok adat dan keberagamaan lokal di Indonesia.

1.3.1.2. Untuk menganalisa bagaimana dalam konteks politik kekuasaan, relasi antara komunitas-komunitas kesundaan dalam merepresentasikan identitas politik kesundaan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. *Manfaat akademik*, penelitian ini dapat memperkaya pengembangan dan pembangunan perspektif dalam studi agama-agama (*religious studies*), khususnya mata kuliah studi agama-agama lokal dalam materi kebangkitan adat di Indonesia. Sementara ini, penelitian –penelitian yang banyak dilakukan mengenai hal ini di Indonesia, khususnya di lembaga perguruan tinggi agama seperti STAIN, IAIN dan UIN, lebih dominan mendekatinya dalam perspektif teologis. Sehingga

berpretensi untuk menghadap-hadapkan kelompok-kelompok minoritas adat atau keberagaman lokal dengan ortodoksi keagamaan resmi. Dalam penelitian ini, dengan pendekatan antropologis berusaha menganalisa secara ilmiah cara pandang dan pengalaman komunitas lokal dan berusaha menghasilkan suatu penemuan tentang komunitas lokal berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Supaya dapat memberikan informasi ilmiah lebih banyak dan mendalam kepada berbagai pihak mengenai ‘*living religion*’ sebuah masyarakat tertentu, agar prasangka dan kesalahpahaman yang sering menjadi sumber konflik dapat dieliminasi, dan penghargaan terhadap potensi-potensi kearifan lokal bisa terbangun untuk menciptakan kohesi sosial dan pengelolaan alam semesta yang lebih baik.

1.3.2.2. *Manfaat institusional*, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut, khususnya bisa menjadi landasan ilmiah yang kuat untuk mengevaluasi dan membuat kebijakan. Dari sini dapat diungkapkan pandangan, sikap dan praktik-praktik lokal atau strategi komunitas lokal tertentu yang mungkin dapat diakomodasi potensi kearifan lokalnya dalam usaha

penciptaan kohesi sosial, politik dan budaya.

1.3.2.3. *Manfaat praktis*, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat, baik secara lokal di Jawa Barat maupun secara nasional pada umumnya, bahwa pemahaman yang mendalam mengenai komunitas lain dapat melahirkan adanya saling mengerti dan saling memahami diantara masyarakat Indonesia yang multi-etnik dan multi-agama, demi terciptanya hubungan yang lebih baik dan adil. Pemahaman yang memadai terhadap keragaman kelompok-kelompok sosial, agama dan suku bangsa di Indonesia akan menghantarkan pada sikap inklusif, toleran dan bahkan transformatif dalam pergaulan budaya dan bangsa, sebagai potensi untuk penciptaan masyarakat sipil dan pembangunan karakter bangsa. Di sisi yang lain, penelitian ini juga berguna bagi lembaga-lembaga agama, khususnya Islam, sebagai bahan refleksi dakwah agar dapat melakukan transformasi masyarakat ke arah yang lebih baik dan bermoral, dengan cara-cara yang lebih toleran, mampu menghargai tradisi lokal dan memahami batin masyarakat lokal.

1.4. Penelitian Terdahulu

Banyak peneliti maupun penulis yang telah meneliti dan menulis kajian tentang komunitas-komunitas (minoritas) lokal, baik berupa komunitas etnik maupun komunitas kepercayaan atau agama lokal. Mengenai penelitian sebelumnya, peneliti berusaha merangkumnya dalam bentuk road map penelitian yang ditulis dalam bentuk tabel. Beberapa penelitian yang telah dihasilkan oleh para sarjana, dan memiliki relevansi dengan tema penelitian ini, adalah:

- Niels Mulder dalam bukunya, *Misticism in Java: Ideology in Indonesia*⁹, dalam pandangan dunia Jawa (mysticism of Java), otonomi individu dan ekspresi diri dalam masyarakat serta hubungan aktif dengan dunia materi dinilai negatif. Pemikiran Jawa tidak memberi makna positif kepada otonomi individual ataupun konfrontasi langsung dengan dunia benda-benda. Kebudayaan Indonesia sendiri tidak memiliki pedoman-pedoman berarti untuk memenuhi tuntutan modernisasi (gagasan pembangunan orde baru), seperti otonomi individu dan lingkungan positif dengan dunia materiil. Akibatnya, Indonesia berpaling pada model-model pembangunan yang berakar dalam kebudayaan Barat

⁹ Niels Mulder, *Misticism in Java: Ideology in Indonesia*. (Singapore: The Pepin Press, 1998).

yang menekankan otonomi individu dan penanganan dunia materiil, yang sulit untuk diterapkan pada kenyataan Indonesia. Mulder juga menolak konsepsi Geertz tentang sinkretisme yang dianggap kurang relevan untuk melihat Islam di Jawa. Ia lebih suka menggunakan konsep baru, yakni lokalitas. Dalam lokalitas, ada unsur yang selalu menyesuaikan. Islam yang datang belakangan akan menyesuaikan dengan unsur lokal, sehingga inti yang sesungguhnya adalah unsur lokalnya, dia menyebut “*misticism of Java*”. Niels Mulder, tampaknya sangat konsen mengkaji berbagai agama atau kepercayaan lokal. Kajiannya tampak bukan hanya terbatas pada agama atau kepercayaan lokal yang berkembang di Indonesia saja, tetapi juga di negara Filipina, bahkan di Thailand. Seperti yang nampak dalam beberapa karya tulisnya, yaitu: *Mysticism & Everyday Life in Contemporary Java*; *Mysticism in Java: Ideology in Indonesia*; *Inside Southeast Asia: Thai, Javanese, and Filipino Interpretations of Everyday Life*; serta *Individual and Society in Java: A Cultural Analysis*.

- Clifford Geertz dalam karyanya, “*The Religion of Java*”¹⁰, buku yang cukup berpengaruh dan banyak diikuti oleh

¹⁰ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, judul asli *The Religion of Java*, alih bahasa Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981)

peneliti sesudahnya dalam kajian identitas kebudayaan lokal Jawa. Geertz memilah masyarakat Jawa ke dalam tiga golongan utama: santri, merupakan kalangan muslim ortodoks; priyayi, kalangan bangsawan yang dipengaruhi terutama oleh tradisi² Hindu-Jawa; abangan, masyarakat desa yang menganut kepercayaan. [teori ini mendapat banyak kritik dari para sarjana Barat dan Indonesia –Harsya Bactiar 1973; Drewes 1968; Suparlan 1976]. Dalam kajiannya tentang agama Jawa, Geertz berasumsi bahwa Islam dan Jawa memang bercorak sinkretik, artinya terdapat perpaduan diantara dua atau lebih budaya (Islam, Hindu, Budha, Animisme) yang disebut sebagai agama jawa.

- Robert W. Hefner, tahun 1985, dalam karya “*Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*”.¹¹ Dia menemukan bahwa kesenjangan kelas tidak selalu memunculkan perjuangan kelas buruh dan pemodal. Di pegunungan Tengger, realitas kelas ternyata selalu terkait dengan pengaruh agama, identitas etnis, visi kebangsaan, gender dan dasar solidaritas yang lain. Namun demikian, realitas masyarakat pegunungan Tengger yang kompleks dan plural memberikan kekayaan perpektif dalam proses

¹¹ Robert W. Hefner, *Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*, alih bahasa: A Wisnuhardana & Imam Ahmad, (Yogyakarta: LKiS, 1999)

pembentukan masyarakat sipil. Dan menawarkan sebuah pandangan bahwa untuk membangun masyarakat sipil harus di atas dasar-dasar pluralisme yang ada dalam masyarakat.

- Mark Woodward, sekitar tahun 1988, dalam karya “*Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan*”¹². Ritual-ritual kraton (seperti grebeg maulud, juga filsafat wayang Jawa yang telah mengalami islamisasi) dan sistem mistik kejawen diderivasi dari Islam. Islam merasuk demikian cepat dan mendalam dalam struktur kebudayaan Jawa sebab ia dipeluk oleh keraton sebagai basis untuk negara teokratik. Sufisme (Islam mistik) membentuk inti kepercayaan negara dan teori kerajawian. Sementara doktrin syari’ah dan ritual-ritual serta berbagai tingkah laku yang dihubungkan dengannya ia sebut sebagai “kesalehan normatif”. Sedangkan “doktrin suci”nya adalah bahwa gnosis atau kesatuan dengan Allah bisa dicapai melalui jalan mistik (variasi Islam yang dikenal sufisme). Oleh karena itu, Islam Jawa dan Islam normatif lebih baik dipahami sebagai oerientasi-orientasi keagamaan atau bentuk-bentuk kesalehan daripada sebagai kategori-kategori sosiologis campuran. Dia menyimpulkan bahwa Islam dan unsur lokal

¹² Mark Woodward, *Islam Jawa : Kesalehan Normatif versus Kebatinan*, judul asli: *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism*, alih bahasa: Hairus Salim, (Yogyakarta: LKiS, 1999)

itu adalah sesuatu yang akulturatif sesuai dengan prosesnya masing-masing.

- Yekti Maunati, 1997-1998, dalam buku “*Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*”.¹³ Hasil penelitiannya menunjukkan adanya pergeseran identitas Orang Dayak. Dulu, acuan utamanya berupa identitas kesukuan, seperti Kenyah, Benuaq, Tunjung, dan Kayan, kini acuannya adalah satu kelompok etnis: identitas Dayak. Sesungguhnya proses ini adalah bagian dari proses modernisasi. Ironisnya, banyak diantara penanda kultural yang otentik dan unik menghilang dalam proses modernisasi, namun hal ini dibarengi dengan semakin menguatnya pandangan tentang satu identitas Dayak yang Tunggal dan mempersatukan. Yekti juga menemukan adanya proses komodifikasi kebudayaan, dia merekam bahwa pariwisata telah bertindak sebagai sebuah pendorong dalam pencarian ‘tradisi Dayak’. Pada gilirannya hal ini, membentuk cara di mana orang Dayak cenderung mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam bentuk ‘orang Dayak baru’ seperti yang diinginkan oleh pasar atau pariwisata.

¹³ Yekti Maunati, *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, (Yogyakarta: LKiS, Cet. II, 2006).

- Maribeth Erb, tahun 2000-2001, “*Kebangkitan Adat di Flores Barat: Budaya, Agama dan Tanah*”.¹⁴ Ada tiga jenis ‘kebangkitan adat’ di Manggarai yang ditemukan: pertama, Kebudayaan fisik dan pertunjukan, munculnya proyek membangun kembali rumah adat tradisional untuk kepentingan pariwisata. Kedua, kebangkitan ritual atau upacara keagamaan, makna reformasi bagi orang Manggarai tidak hanya peluang perubahan politik atau ekonomi, melainkan juga perubahan dalam soal keagamaan. Setelah beberapa dekade ritual pengorbanan hewan sebagai sebuah cara untuk berkomunikasi dengan kekuatan supernatural, dianggap sebagai kebiasaan masa lalu, dilarang oleh gereja, dan tidak disetujui oleh pemerintah. Kini menjadi pemandangan yang lumrah melihat sebuah ritual upacara korban darah dengan kehadiran seorang pastor. Pada saat yang sama, orang-orang yang tidak menjalankan ajaran katolik pun mengklaim identitas Katolik sebagai sesuatu yang esensial melekat pada diri mereka. Jenis yang ketiga, kebangkitan lembaga adat dan kaitannya dengan sengketa tanah, dimana penyelesaian sengketa harus memahami adat.

¹⁴ Maribeth Erb, “Kebangkitan Adat di Flores Barat: Budaya, Agama dan Tanah”, dalam Jamie Davidson dkk., (Ed.), *Adat dalam Politik Indonesia*, penterjemah: Emilius Ola Kleden dan Nina Dwisasanti, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor dan KITLV Leiden, 2010), hal. 269-299.

- Taufiq Tanasaldy, tahun 2004, dalam buku “*Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat*”.¹⁵ Dia menemukan bahwa Politik identitas etnis di Kalimantan Barat, selalu Identik dengan politik elit Dayak. Karena Orang Dayak merupakan satu-satunya segmen masyarakat yang sering terlibat menggunakan sentimen etnis. Kecuali, selama Orde Baru, dimana mereka mengalami sejarah panjang marjinalisasi. Akhir Orde Baru, pertengahan 1990, mulai bangkitnya kembali politik etnis, elit Dayak mulai menggugat rezim. Masa Reformasi 1998, lewat politik demonstrasi massanya, elit Dayak mampu menekan Pemerintah untuk memilih dua Bupati Dayak. Sedangkan Etnik Melayu, biasanya cenderung menghindari mobilisasi massa, meski sering terlibat dalam politik internal birokrasi, karena punya pengaruh yang lebih baik. Kini karena mulai terancam oleh bangkitnya politik Dayak, akhirnya membentuk sebuah organisasi etnis pada tahun 1997. Dan pasca konflik Melayu dan Madura tahun 1999, orang Melayu mulai menjawab tantangan yang disodorkan oleh Orang Dayak. Pasca tahun 1999, dinamika politik di antara Orang Dayak berubah, majelis Adat mulai kehilangan

¹⁵ Taufiq Tanasaldy, Tulisan “Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat”, dalam *Politik Lokal di Indonesia*, Henk Schult Nordholt, dkk. (ed.), alih bahasa: Bernard Hidayat, (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), hal. 461-490.

pengaruh karena posisi-posisi kunci, khususnya kedudukan bupati, sekarang secara institusional telah dibagi antara Melayu dan Dayak. Sementara, Melayu mulai mampu menciptakan tandingan yang efektif, organisasi-organisasi yang berkaitan dengan Melayu mulai bermunculan. Kesimpulannya politik identitas etnis akan selalu memainkan peranan penting dalam politik Kalimantan, dimana ‘berbagi kekuasaan’ antaretnis yang diterapkan telah sukses menghilangkan pemicu kekerasan sehingga bisa mencegah terulangnya konflik tahun 1997 dan 1999.

- Amin Mudzakkir, tahun 2009, *“Pariwisata, Masyarakat Adat, dan Problem Minoritas: Kasus Kampung Naga, Tasik-malaya”*.¹⁶ Identitas Masyarakat Kampung Naga yang secara etnis adalah orang sunda dan beragama muslim seperti halnya kampong di lingkungan sekitarnya, yang memiliki ekspresi cultural dan keagamaan yang secara umum tidak jauh berbeda, meski terdapat beberapa keunikan dalam ritualnya yang bermakna inklusif, justru karena kehadiran para ilmuwan ,wisatawan, dan melalui keputusan para pengambil kebijakan, kesan minoritas itu muncul ke

¹⁶ Amin Mudzakkir, “Pariwisata, Masyarakat Adat, dan Problem Minoritas: Kasus Kampung Naga, Tasikmalaya”, dalam Hikmat Budiman (Editor), *Hak Minoritas: Ethnos, Demos, dan Batas-batas Multikulturalisme*, (Jakarta: The Interseksi, 2009), hal. 37-88.

permukaan, dianggap sepenuhnya berbeda dengan identitas masyarakat sekitarnya. Dalam suasana reformasi, seiring kebijakan otonomi daerah, karena desakan kepentingan ekonomi pariwisata yang telah berlangsung lama, simbol-simbol masyarakat adat di suatu daerah, kabupaten atau kota, dikomodifikasi sedemikian rupa menjadi ikon-ikon kota atau kabupaten. Pemerintah lokal sekarang memainkan peran yang jauh lebih besar daripada masa sebelumnya.

- Abdul Syukur, tahun 2009, “*Politik Identitas Agama Budha*”.¹⁷ Menemukan bahwa pendefinisian kembali agama Buddha telah berhasil membuat agama Buddha diakui secara resmi dan mendapat kedudukan yang setara dengan agama-agama lain. Akan tetapi, di balik keberhasilan agama Buddha menjadi salah satu agama resmi, identifikasi umat Buddha yang berbeda terhadap agama Buddha membuat pendefinisian agama Buddha menjadi berbeda pula. Perbedaan identifikasi ini terkait isu-isu sektarian, etnisitas, maupun organisasi sehingga agama Buddha menjadi ajang kontestasi di kalangan umat Buddha.
- Nengah Bawa Atmadja, tahun 2010, dalam “*Ajeg Bali*:

¹⁷ Abdul Syukur, “Politik Identitas Agama Buddha: Analisis Historis”, dalam, *Jurnal Wawasan*, Vol. 32, nomor 1, diterbitkan Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung, 2009, hal 91-103.

Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi”¹⁸. Dia menemukan bahwa problem pembangunanisme dan globalisasi telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial pada masyarakat Bali, agama pasar, masyarakat yang semakin konsumtif, dekadensi moral, sampai perkelahian antar sesama orang Bali yang dipicu oleh perebutan sumber ekonomi serta perbedaan memaknai tradisi dan ajaran. Realitas inilah yang mendorong keprihatinan masyarakat Bali dan memunculkan wacana Ajeg Bali. Wacana ‘Ajeg Bali’ sebagai suatu gerakan kultural mencari identitas Bali yang asli dan sejati melawan globalisasi dan pengaruh-pengaruh negatifnya.

Dari pemaparan tersebut, menurut penulis, belum ada seorang peneliti yang secara spesifik dan mendalam mengkaji dalam perpektif antropologis mengenai **Politik Identitas Sunda: Pergulatan Ideologi Kebudayaan dan Politik Kekuasaan** (Studi terhadap Institusi-institusi Sosial Kesundaan Di Jawa Barat).

1.5.Kerangka Pemikiran

Dalam wacana antropologi, Identitas berarti “menjadi

¹⁸ Nengah Bawa Atmadja, *Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*, (Yogyakarta: LKiS, 2010).

diri sendiri, berbeda dengan yang lain”. Ketika kita berbicara tentang “identitas” dalam antropologi sosial, kita merujuk pada identitas sosial, bukan berbicara mengenai pikiran individu secara mendalam. Oleh karena itu, kita memulainya dengan melihat pada hubungan sosial dan organisasi sosial. Agar mendapatkan pegangan mengenai identitas kelompok, kita harus memahami batas-batas yang disebut klasifikasi kelompok dan kategori tentang “rasa memiliki” yang dapat dimengerti pada orang-orang yang terlibat.¹⁹ Dan penanda-penanda identitas kelompok bisa berasal dari sebuah kekhasan kebudayaan tertentu, berupa identitas etnik dari suku tertentu.

Mengenai kebudayaan, Geertz mengajukan dua gagasan mengenai sistem kebudayaan, yaitu: *pertama*, kebudayaan sebaiknya tidak dilihat sebagai kompleks pola tingkah laku konkret saja, misalnya adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, kumpulan-kumpulan kebiasaan, seperti yang biasa dilakukan sampai hari ini, melainkan sebagai perangkat mekanisme kontrol, yaitu rencana-rencana, resep-resep, aturan-aturan, instruksi-instruksi untuk mengatur tingkah laku; *kedua*, Manusia pada dasarnya hampir sama dengan hewan yang amat tergantung pada mekanisme kontrol di luar kulit yang bersifat ekstragenetis, program-program kultural itu, untuk mengatur

¹⁹ Thomas Hylland Eriksen, *Ethnicity and Nationalism*, hal. 59

tingkah lakunya.²⁰ Oleh karena itu segala mekanisme kontrol seperti nilai-nilai, norma-norma, ajaran agama, amanah leluhur, pamali-pamali merupakan kebudayaan, yang sekaligus juga disebut keberagamaan.

Melihat bentuk-bentuk kebudayaan, Koentjaraningrat membagi kebudayaan dalam tiga wujud (bentuk), yaitu: *pertama*, kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya ini lazim disebut sistem budaya; *kedua*, kebudayaan sebagai suatu kompleks dari aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, yang biasanya disebut dengan sistem sosial; *ketiga*, kebudayaan sebagai benda-benda, bangunan-bangunan, karya manusia yang berbentuk fisik.²¹

Selanjutnya Koentjaraningrat mengemukakan bahwa konstruksi kebudayaan itu bukanlah sesuatu yang diturunkan secara genetis; melainkan melalui proses belajar dari masing-masing individu di dalam masyarakat.²² Oleh karena itu sangat memungkinkan konstruksi kebudayaan itu mengalami

²⁰ Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan*. Alih bahasa: Francisco Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius.1992). hal.55

²¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990). Hal. 186-187

²² *Ibid*, hal. 187

perubahan. Hal ini dipertegas oleh Garna²³ bahwa: perubahan itu selalu berlaku pada semua masyarakat manusia, karena yang hidup bermasyarakat merupakan subyek dan sasaran dari perubahan itu. Kemudian dia menyatakan bahwa proses perubahan mungkin berlangsung dalam berbagai jenis kelajuan, evolutif maupun revolusioner. Perubahan itu muncul dalam kaitan yang tak runtut maupun yang runtut karena aspek potensial masyarakat sendiri dan datang dari luar, yang kemudian membentangi alur perubahan-perubahan tertentu.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Friedman, bahwa konstruksi identitas sosial sesuai dengan konteks situasi dan kondisi yang terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu, identitas pada dasarnya bersifat cair, apabila situasi dan kondisi berubah maka konstruksi identitas pun akan berubah²⁴. Demikian juga, Hylland Eriksen mengemukakan, bahwa “identitas dapat berubah. Perubahan identitas karena yang menjadi batas-batas identitas berubah dan batas-batas identitas tersebut bersifat arbitrar, yaitu hanya elemen-elemen tertentu yang dipilih dan dianggap penting”. Lebih lanjut Hylland Eriksen menyatakan: “Identitas sosial bersifat relasional, yang menunjukkan adanya

²³ Yudistira K Garna, *Teori-teori Perubahan Sosial*, (Bandung: Program Pasca Sarjana UNPAD, 1992), hal.1

²⁴ Jonathan Friedman, *Cultural Identity and Global Process*, (London: Sage Publications.Friedman 1995), hal.117.

hubungan yang dekat antara identitas dan kondisi sosial sekitar. Identitas bisa berubah, jika masyarakat berubah. Sistem klasifikasi sosial dan prinsip-prinsip mengenai inklusi dan eksklusi selalu membentuk peraturan, namun seperangkat peraturan dibentuk berkaitan dengan aspek-aspek sistem sosial yang lebih luas”.²⁵

Yekti Meunati, juga berpendapat bahwa : “Identitas budaya dengan sengaja dibentuk atau dibangun. Konstruksi identitas budaya bersifat kompleks sebagian karena konstruksi ini merupakan salah satu produk sejarah. Identitas kebudayaan itu sendiri bisa berubah dan diubah bergantung pada konteksnya, pada kekuasaan, dan vested interested yang bermain”.²⁶

Kelompok-kelompok yang berkuasa memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan identitas. Barth, misalnya, mencatat kompleksnya kelompok ‘pihak-pihak yang berwenang’ yang terlibat dalam pendefinisian dan pembentukan representasi ‘orang Bali’, termasuk para pemimpin agama, pejabat-pejabat pemerintah, politisi-politisi Bali, para antropolog, dan sebagainya.²⁷

²⁵ Thomas Hylland Eriksen, *Ethnicity and Nationalism*, hal. 62

²⁶ Yekti Maunati, *Identitas Dayak*....., hal. 31

²⁷ Barth (1989:127-128). Dikutip dari Yekti Maunati, *Identitas Dayak*, hal. 32

Pembahasan mengenai etnisitas biasanya akan menghadapi kerumitan dengan masalah otentisitas. Berkaitan dengan hal ini Hylland Eriksen menyarankan:²⁸

Ada masalah otentisitas dalam kajian ethnogenesis, namun tugas seorang antropolog lebih pada mempelajarinya dari pada menanyakan tentang itu (otentik tidaknya)?. Kriteria identitas etnik yang otentik dihasilkan dari interaksi diantara anggota dalam kelompok etnik, dan juga antar kelompok etnik, dan dinamika kriteria itu sendiri merupakan bagian dari realitas sosial yang dipelajari.

Sebagai kelompok minoritas, dalam penciptaan batas-batas identitas, penduduk asli atau komunitas adat sering kali dihadapkan atau dipengaruhi oleh kepentingan kelompok-kelompok dominan, baik oleh mayoritas budaya dominan maupun negara sebagai institusi.

Hylland Eriksen menyatakan: “Penduduk asli (*indigenous people*) berdiri dalam sebuah hubungan yang rawan konflik dengan negara sebagai sebuah institusi. Dan konflik akan terjadi antara Penduduk asli (*indigenous people*) dan negara-bangsa, ketika kelompok mayoritas berkeinginan untuk menguasai sumber daya mereka – sumber daya ekologis, sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia – di wilayah

²⁸ *Ibid.*, hal. 131

populasi mereka”.²⁹ Memang basis wilayah seringkali menjadi basis yang sangat penting dan krusial untuk dipertahankan oleh penduduk asli dalam sebuah masyarakat adat, disamping juga basis kultur tradisional mereka yang sering kali dihadapkan pada kenyataan perubahan-perubahan yang datangnya dari luar, seperti perubahan yang didesakkan oleh pengaruh mainstream pikiran rasional modern dan modernisasi teknologi yang demikian cepat.

Dari pemaparan diatas, maka dalam memeriksa Politik Identitas Sunda, baik dalam konteks pergulatan ideologi kebudayaan maupun konteks politik kekuasaan, peneliti mencoba menggunakan kerangka berpikir Hylland Eriksen bahwa identitas dapat berubah jika kondisi masyarakat berubah. Perubahan identitas karena yang menjadi batas-batas identitas berubah dan batas-batas identitas tersebut bersifat arbitrar, yaitu hanya elemen-elemen tertentu yang dipilih dan dianggap penting, bergantung pada konteksnya, pada kekuasaan, dan beragam kepentingan yang bermain.

Politik identitas Sunda bersifat kompleks dan relasional, selalu berhubungan dengan konteks yang lain. Kearifan nilai-nilai tradisional masa lalu sebagai warisan leluhur, dihadapkan pada kondisi-kondisi sosial, ekonomi, demografi, dan teknologi

²⁹ Thomas Hylland Eriksen, *Ethnicity and Nationalism*...., hal. 126

yang berubah, sebagai pengaruh budaya dominan di luarnya; di sisi lain, konstruksi batas-batas identitas adat juga bergantung pada kelompok-kelompok yang berkuasa dan beragam kepentingan yang sedang bermain.

BAB II KAJIAN TEORI

POLITIK IDENTITAS ETNIS

2.1. Konsepsi Identitas

2.1.1. Identitas

Di dunia ini, adakah sesuatu yang tanpa identitas, atau tanpa nama, bukankah dengan identitas sesuatu itu bisa dikatakan sesuatu. Nama, jenis kelamin, bahasa, suku, agama, dan lain-lainnya merupakan kategori identitas-identitas tertentu. Teori tentang identitas dikatakan oleh Bowie, bahwa identitas dikonstruksi secara terus menerus melalui pengalaman hidup di dalam dan ketika berinteraksi dengan dunia. Ini berarti bahwa sepanjang manusia berhubungan dengan yang lain maka sesungguhnya sedang mengkonstruksi identitasnya³⁰.

Kajian tentang sebuah identitas, awalnya erat kaitannya dengan ranah humanitas dan psikologi manusia. Pengaruh negatif yang disodorkan modernisme, mulai mengikis sisi-sisi humanitas dari diri manusia. Problem hilangnya identitas kemanusiaan menjadi problem orang-orang modern. Dengan mengutip Bloom (1990:25), Ubed Abdillah mendeskripsikan, bahwa makna identitas dapat ditelusuri melalui suatu kajian

³⁰ Fiona Bowie, *The Anthropology of Religion*, (Oxford: Blackwell Publishers, 2001), hal. 71.

dalam psikologi yang disebut dengan teori identifikasi. Teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud dari ajarannya tentang *psikoanalisa*. Kemudian, dilanjutkan oleh George Herbert Mead, Erik Erikson, Talcot Parson, dan Jurgen Habermas. Yang terpenting diantaranya adalah Erik Erikson yang mengungkapkan suatu gambaran yang menerangkan suatu situasi krusial pada stabilitas dan integritas pribadi manusia. Masih menurut Bloom (1990:26), pada level individuallah, secara teoritis metodologis, penyelidikan atas identitas dapat dimungkinkan. Oleh karena pada dasarnya individu-individu dihubungkan dalam suatu sindrom psikologis yang sama dan akan beraksi bersama-sama untuk menjaga, mempertahankan, memperbaiki, dan memperkaya identitasnya.³¹ Oleh karena itu bagi Erik Erikson dan Bloom, masalah identitas merupakan problem identitas individu.

Tidak puas dengan penjelasan Erik Erikson, Harold Isaac mengajukan konsepnya tentang “identitas kelompok”, ia mendapatkan landasan konsepnya dari gagasan Erik Erikson. Ia menolak gagasan Erik Erikson bahwa orang-orang yang sudah mampu mengatasi problem identitas pribadinya sendiri sudah tidak lagi memerlukan perlindungan dari identitas kelompok.

³¹ Ubed Abdillah, *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, (Magelang: Penerbit IndonesiaTera, 2002), hal. 29.

Harold Isaac lebih terkesan dengan kenyataan yang berkata bahwa yang terjadi justru kebalikannya: orang-orang menemukan identitas pribadinya sendiri hanya melalui penanaman emosi di dalam identitas kelompok. Ia berkesimpulan bahwa Identitas kelompok tidak akan mudah bisa dihilangkan atau akan terhapus dengan sendirinya, tetapi justru akan disuburkan dengan intensitas emosi dan keruwetan psikologis, yang diketemukan Erik Erikson dalam problem identitas individu.³² Dia sangat yakin bahwa sentimen-sentimen primordial yang sejak semula telah ada akan selamanya tetap bertahan.

Harold Isaac memulai penyelidikannya dengan tingkat yang paling mendasar, dengan mencoba memahami dasar realitas yang sukar dimengerti itu. Menurutnya, untuk memahami identitas kelompok, seseorang harus mempelajari arti penting tubuh (termasuk warna kulit), nama-nama, bahasa, dan aksen, peranan sejarah, mitos asal-mula tubuh, agama, dan akhirnya akar-akar nasionalisme.³³

Dalam kajian antropologi sosial, awalnya pendekatan yang menfokuskan diri pada aspek identitas kelompok etnik,

³² Baca Harold R. Isaacs, *Pemujaan terhadap Kelompok Etnis: Identitas Kelompok dan Perubahan Politik*, judul asli: *Idols of the Tribe: Group Identity and Political Change* (Alih bahasa: Canisys Maran). Jakarta: Yayasan Obor (1993), hal. vi-x

³³ *Ibid.*, hal. viii

banyak menghadapi skeptisisme. Ketika itu antropologi hanya bekerja pada proses pengambilan lokasi diantara masyarakat, dan ketika itu identitas secara konvensional dianggap hanya untuk menyelidiki masalah didalam (*inside*) setiap individu, selama itu pula studi tentang identitas personal ditolak oleh antropologi. Tahun-tahun belakangan, bisa dikatakan ada tahap kemajuan dalam kajian antropologis mengenai identitas. Hal itu ditunjukkan dalam ilmu antropologi sosial bahwa aspek personal yang dulunya dianggap tidak berubah, “*inner*” dan “*private*”, kini dipelajari sebagai aspek simbolik dalam proses sosial. Apa yang dulunya dipandang *private*, bawaan dan tetap, sekarang mengalami perkembangan, telah dipandang sebagai publik dan bisa dinegosiasikan. Studi mengenai etnik banyak menjelaskan adanya hubungan antara proses sosial dan identitas personal.³⁴

Dalam wacana antropologi, Identitas berarti “menjadi diri sendiri, berbeda dengan yang lain”. Ketika kita berbicara tentang “identitas” dalam antropologi sosial, kita merujuk pada identitas sosial, bukan berbicara mengenai pikiran individu secara mendalam. Oleh karena itu, kita memulainya dengan melihat pada hubungan sosial dan organisasi sosial. Agar mendapatkan pegangan mengenai identitas kelompok etnik,

³⁴ Thomas Hylland Eriksen, *Ethnicity and Nationalism*, 59-60

kita harus memahami apa itu yang disebut klasifikasi kelompok etnik (ataupun agama) dan kategori tentang “rasa memiliki” yang dapat dimengerti pada orang-orang yang terlibat.³⁵ Penanda-penanda identitas kelompok bisa berasal dari sebuah kekhasan yang diyakini ada pada agama, bahasa dan adat yang bersangkutan. Kadang, tumpang tindih bisa terjadi di antara kelompok-kelompok yang berbeda-beda.

Dalam kajian ini, istilah identitas adalah seperti yang dikatakan Eisenberg dalam *Reason and Identity* (2009), merujuk pada loyalitas seseorang terhadap kelompok sosial tertentu yang mempunyai cara hidup, serentetan keyakinan yang berperan sangat penting bagi konsepsi diri mereka. Secara sosiologis identitas personal melahirkan identitas kelompok yang bisa membentuk *in-group feeling* dan *out-group feeling* dalam proses penciptaan batas-batas identitas mereka dengan yang lain.

2.1.2. Konstruksi Identitas

Ketika berbicara mengenai identitas sosial atau identitas sebuah kelompok, maka mulai diperlukan klasifikasi kelompok etnik (atau klasifikasi lain) dan kategori tentang “rasa memiliki” yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang

³⁵ Thomas Hylland Eriksen, *Ethnicity and Nationalism*, hal. 59

terlibat. Di sinilah penanda-penanda identitas yang berupa batas-batas klasifikasi dan kategori-kategori suatu kelompok mulai diciptakan, dibangun atau dikonstruksi diantara kelompok-kelompok yang berbeda-beda.

Dalam antropologi sosial, “identitas” merujuk pada identitas sosial, bukan berbicara mengenai pikiran individu secara mendalam. Identitas berarti menciptakan batas-batas, berbeda dengan yang lain. Oleh karena itu telah dipandang sebagai publik dan bisa dinegosiasikan. Meskipun ada hubungan antara proses sosial dan identitas personal. Aspek personal dipelajari sebagai aspek simbolik dalam proses sosial. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Friedman, bahwa konstruksi identitas sosial sesuai dengan konteks situasi dan kondisi yang terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu, identitas pada dasarnya bersifat cair, apabila situasi dan kondisi berubah maka konstruksi identitas pun akan berubah³⁶. Demikian juga, Hylland Eriksen mengemukakan, bahwa identitas dapat berubah. Perubahan identitas karena yang menjadi batas-batas identitas berubah dan batas-batas identitas tersebut bersifat arbitrar, yaitu hanya elemen-elemen tertentu yang dipilih dan dianggap penting. Lebih lanjut Hylland Eriksen menyatakan:

“Identitas sosial bersifat relasional, yang menunjukkan

³⁶ Jonathan Friedman, *Cultural Identity and Global Process...*, hal.117.

adanya hubungan yang dekat antara identitas dan kondisi sosial sekitar. Identitas bisa berubah, jika masyarakat berubah. Sistem klasifikasi sosial dan prinsip-prinsip mengenai inklusi dan eksklusi selalu membentuk peraturan, namun seperangkat peraturan dibentuk berkaitan dengan aspek-aspek sistem sosial yang lebih luas”.³⁷

Yekti Meunati, juga berpendapat bahwa :

“Identitas budaya dengan sengaja dibentuk atau dibangun. Konstruksi identitas budaya bersifat kompleks sebagian karena konstruksi ini merupakan salah satu produk sejarah. Identitas kebudayaan itu sendiri bisa berubah dan diubah bergantung pada konteksnya, pada kekuasaan, dan vested interested yang bermain”.³⁸

Kelompok-kelompok yang berkuasa memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan identitas. Barth, misalnya, mencatat kompleksnya kelompok ‘pihak-pihak yang berwenang’ yang terlibat dalam pendefinisian dan pembentukan representasi ‘orang Bali’, termasuk para pemimpin agama, pejabat-pejabat pemerintah, politisi-politisi Bali, para antropolog, dan sebagainya.³⁹ Disisi yang lain, Yekti Meunati merekam bahwa citra-citra “Dayak baru” yang telah dibangun oleh kelompok-kelompok yang berkuasa,

³⁷ Thomas Hylland Eriksen, *Ethnicity and Nationalism*, hal. 62

³⁸ Yekti Maunati, *Identitas Dayak*....., hal. 31

³⁹ Barth (1989:127-128). Dikutip dari Yekti Maunati, *Identitas Dayak*, hal. 32

anehnya sering diadopsi juga oleh penduduk setempat dan dipadukan ke dalam identitas-identitas mereka sendiri.⁴⁰

Di Indonesia, pemerintah orde baru sangat aktif dalam usahanya mengarahkan masyarakat agar menerima batasan-batasan politik dan kultural yang dipilihkannya. Batasan-batasan agama dan kebudayaan harus dikonstruksi dalam kerangka politik kebudayaan dan ideologi negara. Hal ini sering kali menempatkan kelompok minoritas etnik maupun agama lokal menjadi nomor dua. Semua diarahkan untuk menerima batasan-batasan politik dan kultural yang dibentuk oleh Negara. Definisi agama misalnya, harus disesuaikan dengan ideologi negara “Pancasila”, salah satu bunyinya: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Agama apapun yang ada di Indonesia, harus memiliki konsep Ketuhanan agar bisa diterima sebagai Agama. Akibatnya, agama yang tidak memiliki konsep ketuhanan harus beradaptasi dan menyesuaikan diri. Abdul Syukur, ketika mengkaji politik identitas agama Buddha di Indonesia menunjukkan proses adaptasi semacam ini sebagai bentuk negosiasinya agar tetap bertahan.⁴¹ Identitas Buddha

⁴⁰ Yekti Maunati, *Identitas Dayak*, hal. 364-366

⁴¹ Ketika definisi agama Buddha dipersoalkan terkait konsep Ketuhanan yang absen dalam sistem kepercayaan agama Buddha, Jinarakkhita berusaha menyesuaikan agama Buddha dengan tuntutan politik yang ada dengan cara mengambilnya dari naskah lawas berbahasa Kawi, *Sang Hyang Kamahayanikan*. Dibantu para pengikutnya Jinarakkhita kemudian

yang ajaran awalnya tidak ada konstruksi “ketuhanan” dan dianggapnya tidak terlalu penting, maka untuk situasi dan kondisi di Indonesia merekonstruksi ajaran dalam konstruk baru yang memiliki konsep ‘ketuhanan’. Hal ini menunjukkan kontruksi identitas kelompok yang berubah dan selalu berhubungan dengan situasi dan kondisi diluarnya.

Identitas dikonstruksi dalam hubungan-hubungan dengan yang lain (others) sehingga identitas pada hakikatnya bersifat relasional dan dapat berubah seperti dikatakan oleh Eriksen:⁴²

Kelompok-kelompok dan kolektivitas-kolektivitas selalu dibentuk dalam hubungan dengan yang lain (others). Orang-orang Eropa, misalnya, akan mendefinisikan identitasnya secara kontras dalam hubungannya dengan identitas orang-orang muslim, Timur Tengah, atau Arab, mungkin juga dalam hubungannya dengan identitas orang-orang Afrika, Timur Jauh dan Amerika Utara bergantung pada situasi

merumuskan “Adi Buddha” sebagai konsep Ketuhanan dalam agama Buddha sehingga agama Buddha dapat memenuhi kriteria “agama” sebagaimana yang disyaratkan pemerintah. Ishii (1984: 113) menyebutkan bahwa *Sang Hyang Adi Buddha* sebagai konsep Ketuhanan dalam agama Buddha dilahirkan pada bulan Mei 1965 – empat bulan sebelum terjadinya peristiwa kudeta PKI 30 September 1965. Dalam konteks sosial-politik yang anti-Komunisme yang anti-Tuhan, respon umat Buddha ini sangat positif sehingga umat Buddha lepas dari tuduhan ateis atau, paling tidak, tidak dianggap sebagai simpatisan PKI yang dianggap telah melancarkan kudeta berdarah terhadap kekuatan militer (Abdul Syukur, “*Politik Identitas Agama Buddha*, dalam Jurnal Wawasan, Vol. 32, nomor 1, diterbitkan Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung, 2009, hal. 95).

⁴² Thomas Hylland Eriksen, *Ethnicity and Nationalism*...., hal. 62

sosial.

Senada dengan Eriksen, Friedman⁴³ mengemukakan bahwa konstruksi identitas tidak terjadi di ruang hampa udara (*vacuum*), melainkan berlangsung di dalam suatu dunia yang telah terbentuk sebelumnya. Ini berarti bahwa konstruksi identitas bersifat kontekstual atau tidak lepas dari konteks di mana hubungan-hubungan sosial berlangsung.

2.2. Politik Identitas Etnis

Sementara politik identitas, menurut Denton dalam *Studies Identity in the 2008 Presidential Election* (2010), adalah politik yang didasarkan pada kelompok yang merepresentasikan kepentingan mereka ketimbang kelompok lainnya. Dimana menurut Dedy Jamaluddin Malik, dalam artikelnya “*Pilgub dan Politik Identitas*”,⁴⁴ ada beberapa asumsi yang mendasari identitas politik. *Pertama*, anggota kelompok punya kesamaan sejarah yang hingga sekarang merasa terpinggirkan dan diasingkan. *Kedua*, pengalaman ketertindasan bersama adalah pertanda identitas dan menggantikan semua bentuk identitas lainnya. *Ketiga*, anggota kelompok adalah persekutuan anggota yang tangguh.

Di Indonesia, kebebasan politik era reformasi pasca

⁴³ Jonathan Friedman, *Cultural Identity and Global Process...*, hal.117

⁴⁴ Koran Pikiran Rakyat, Senin 31 Desember 2012, hal.26.

kejatuhan Soeharto pada Mei 1998, menciptakan kondisi yang telah mendorong munculnya wacana kebangkitan adat atau primordialisme etnik tertentu, dimana kelompok-kelompok adat berusaha untuk menegosiasikan kembali hak-hak atas eksistensi kebudayaan mereka dan sumber daya alam di wilayah mereka. Kebangkitan adat melalui gerakan masyarakat adat dan keterkaitannya dengan advokasi internasional tentang *indigenous rights* (hak-hak masyarakat adat).

Secara umum, ada tiga persoalan mendasar yang dialami oleh kelompok-kelompok masyarakat adat terkait dengan *indigenous rights* di Indonesia, yaitu: persoalan wilayah (berkaitan dengan sumber daya ekologis, ekonomi dan manusia), penolakan terhadap modernitas (lembaga-lembaga modern yang dibentuk oleh negara), dan terkait dengan eksistensi cara pandang hidup, atau system kepercayaan adat mereka. Beragam bentuk kebangkitan adat di Indonesia berhubungan dengan ketiga persoalan tersebut. *Pertama*, berkaitan dengan persoalan wilayah, kini masyarakat adat mulai berani menuntut wilayahnya kembali atau meminta kompensasi atas tanah mereka, setelah masyarakat merasa kehilangan tanah untuk kepentingan pertambangan, perusahaan penebangan hutan dan berbagai bentuk pembangunan oleh Negara pada masa orde baru. Di Bali sebagai gambaran

penegasan kembali klaim adat terhadap otoritas atas wilayah mereka. Kasus ‘tekanan’ dari sekitar 300 penduduk kampung yang mengatasnamakan adat, memaksa sebuah perusahaan konstruksi untuk mengembalikan ratusan meter kubik tanah kapur yang telah diangkut untuk menimbun muara yang akan dijadikan lahan pembangunan hotel. Masyarakat adat sudah menentukan harga mati bahwa muara sungai itu tidak boleh diganggu⁴⁵. Di Papua, perusahaan Freeport dan perusahaan besar lainnya mengalami tekanan untuk mengakui kewajiban mereka akibat menggunakan tanah adat⁴⁶.

Kedua, berkaitan dengan penolakan terhadap lembaga-lembaga modern, masyarakat adat mulai menolak bentuk-bentuk modernitas sebagai dampak dari ideologi pembangunan, yang telah meminggirkan lembaga-lembaga lama dan sangat dihormati di daerah-daerah. Misalnya di Sumatera Barat, persiapan untuk menghidupkan kembali nagari sebagai satuan pemerintahan dilakukan dan berusaha mengembalikan yurisdiksi atas tanah-tanah komunal yang

⁴⁵ Carol Warren, “Adat dalam Praktik dan Wacana Orang Bali: memposisikan prinsip kewargaan dan kesejahteraan bersama (*‘commonweal’*)”, dalam Jamie Davidson dkk., (Ed.), *Adat dalam Politik Indonesia...*, hal. 213-214.

⁴⁶ (ICG 2002:13, 19-20) dikutip dari David Henley dan Jamie Davidson, “*Pendahuluan: Konservatisme radikal-Aneka wajah politik Adat*” ..., hal.19.

sebelumnya di bawah pengurusan mereka.⁴⁷

Ketiga, di beberapa kasus, kebangkitan adat juga seiring dengan kebangkitan praktik-praktik kepercayaan tradisional yang dianggap menyimpang atau sudah dilarang demi kepentingan ortodoksi keagamaan – kebijakan agama resmi yang diakui oleh negara. Di Flores Barat, di kalangan penganut Katholik mulai mengapresiasi terhadap ritual lokal pra-kedatangan agama Kristen yang sudah mulai mendapat angin di akhir periode orde baru sebagai akibat dari kepentingan wisatawan Barat yang sudah tidak merujuk lagi pada agama Kristen dalam kehidupan mereka. Namun posisi gereja umumnya masih tetap kaku, sesuai dengan ideology orde baru dan theologi katolik konservatif. Era reformasi, dianggap sebagai sebuah pembebasan baik secara politik maupun dalam bidang keagamaan. Sebuah tanda yang mencolok di era baru, di kampung-kampung dan kota-kota kecil, mereka boleh dikatakan sudah kembali ke ritual-ritual tradisional yang menyertakan korban darah, yang dulu hampir lenyap.⁴⁸

⁴⁷ (F. von Benda-Beckmann dan K von Benda-Beckmann 2001) dikutip dari David Henley dan Jamie Davidson, “*Pendahuluan: Konservatisme radikal-Aneka wajah politik Adat*”..., hal.19.

⁴⁸ Maribeth Erb, “Kebangkitan adat di Flores Barat: Budaya, agama, dan tanah”, dalam Jamie Davidson dkk., (Ed.), *Adat dalam Politik Indonesia...*, hal.269-271.

Dalam penelitian Maribeth Erb⁴⁹, kebangkitan adat di Flores Barat menunjukkan adanya tiga jenis ‘kebangkitan adat’, pertama dalam bentuk kebudayaan fisik dan pertunjukan, dengan munculnya berbagai proyek pembangunan kembali rumah adat tradisional; *kedua*, kebangkitan ritual dan upacara-upacara tradisional keagamaan; *ketiga*, kebangkitan kelembagaan adat terkait dengan otoritas pemanfaatan tanah. Yang menarik adalah, baik kebangkitan adat dalam bentuk kebudayaan fisik dan seni pertunjukan maupun kebangkitan ritual dan upacara-upacara tradisional dalam rangka menegaskan kekhasan identitas adat mereka ditujukan untuk kepentingan pariwisata.

Penelitian Yekti Maunati, terkait dengan politik kebudayaan yang dilakukan etnik Dayak, menunjukkan adanya pergeseran identitas Orang Dayak. Dulu, acuan utamanya berupa identitas kesukuan, seperti Kenyah, Benuaq, Tunjung, dan Kayan, kini acuannya adalah satu kelompok etnis: identitas Dayak. Yekti juga menemukan adanya proses komodifikasi kebudayaan, dia merekam bahwa pariwisata telah bertindak sebagai sebuah pendorong dalam pencarian ‘tradisi Dayak’. Pada gilirannya hal ini, membentuk cara di mana orang Dayak

⁴⁹ Maribeth Erb, “Kebangkitan adat di Flores Barat: Budaya, agama, dan tanah”, hal. 269-299.

cenderung mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam bentuk ‘orang Dayak baru’ seperti yang diinginkan oleh pasar atau pariwisata.⁵⁰

Proses komodifikasi budaya untuk kepentingan pariwisata, juga terjadi di Kampung Naga Tasikmalaya, Amin Mudzakkir, yang meneliti pada tahun 2009, menemukan bahwa identitas masyarakat Kampung Naga yang secara etnis adalah orang sunda dan beragama muslim seperti halnya kampung di lingkungan sekitarnya, yang memiliki ekspresi kultural dan keagamaan yang secara umum tidak jauh berbeda, meski terdapat beberapa keunikan dalam ritualnya yang bermakna inklusif, justru karena kehadiran para ilmuwan, wisatawan, dan melalui keputusan para pengambil kebijakan, kesan minoritas itu muncul ke permukaan, dianggap sepenuhnya berbeda dengan identitas masyarakat sekitarnya. Dalam suasana reformasi, seiring kebijakan otonomi daerah, karena desakan kepentingan ekonomi pariwisata yang telah berlangsung lama, simbol-simbol masyarakat adat di suatu daerah, kabupaten atau kota, dikomodifikasi sedemikian rupa menjadi ikon-ikon kota atau kabupaten. Pemerintah lokal sekarang memainkan peran

⁵⁰ Yekti Maunati, *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, (Yogyakarta: LKiS, Cet. II, 2006).

yang jauh lebih besar daripada masa sebelumnya.⁵¹

Di Bali, Nengah Bawa Atmadja, menemukan gambaran politik identitas yang berbeda. Dia menemukan bahwa problem pembangunanisme dan globalisasi telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial pada masyarakat Bali, agama pasar, masyarakat yang semakin konsumtif, dekadensi moral, sampai perkelahian antar sesama orang Bali yang dipicu oleh perebutan sumber ekonomi serta perbedaan memaknai tradisi dan ajaran. Realitas inilah yang mendorong keprihatinan masyarakat Bali dan memunculkan wacana Ajeg Bali. Wacana ‘Ajeg Bali’ sebagai suatu gerakan kultural mencari identitas Bali yang asli dan sejati melawan globalisasi dan pengaruh-pengaruh negatifnya.⁵²

Sedangkan di Kalimantan Barat, politik identitas etnis telah memainkan peranannya dalam pergulatan kekuasaan di daerah. Taufiq Tanasaldy, dalam penelitiannya tahun 2004, menemukan bahwa politik identitas etnis di Kalimantan Barat, selalu identik dengan politik elit Dayak. Karena Orang Dayak merupakan satu-satunya segmen masyarakat yang sering

⁵¹ Amin Mudzakkir, “Pariwisata, Masyarakat Adat, dan Problem Minoritas: Kasus Kampung Naga, Tasikmalaya”, dalam Hikmat Budiman (Editor), *Hak Minoritas: Ethnos, Demos, dan Batas-batas Multikulturalisme*, (Jakarta: The Interseksi, 2009), hal. 37-88.

⁵² Nengah Bawa Atmadja, *Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*, (Yogyakarta: LKiS, 2010).

terlibat menggunakan sentimen etnis. Kecuali, selama Orde Baru, dimana mereka mengalami sejarah panjang marjinalisasi. Akhir Orde Baru, pertengahan 1990, mulai bangkitnya kembali politik etnis, elit Dayak mulai menggugat rezim. Masa Reformasi 1998, lewat politik demonstrasi massanya, elit Dayak mampu menekan Pemerintah untuk memilih dua Bupati Dayak. Sedangkan Etnik Melayu, biasanya cenderung menghindari mobilisasi massa, meski sering terlibat dalam politik internal birokrasi, karena punya pengaruh yang lebih baik. Kini karena mulai terancam oleh bangkitnya politik Dayak, akhirnya membentuk sebuah organisasi etnis pada tahun 1997. Dan pasca konflik Melayu dan Madura tahun 1999, orang Melayu mulai menjawab tantangan yang disodorkan oleh Orang Dayak. Pasca tahun 1999, dinamika politik di antara Orang Dayak berubah, majelis Adat mulai kehilangan pengaruh karena posisi-posisi kunci, khususnya kedudukan bupati, sekarang secara institusional telah dibagi antara Melayu dan Dayak. Sementara, Melayu mulai mampu menciptakan tandingan yang efektif, organisasi-organisasi yang berkaitan dengan Melayu mulai bermunculan. Kesimpulannya politik identitas etnis akan selalu memainkan peranan penting dalam politik Kalimantan, dimana ‘berbagi kekuasaan’ antaretnis yang diterapkan telah sukses menghilangkan pemicu

kekerasan sehingga bisa mencegah terulangnya konflik tahun 1997 dan 1999.⁵³

Kebangkitan politik identitas kedaerahan ini menurut David Henley⁵⁴, didorong oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi kebangkitan Adat. *Pertama*, adanya ‘tekanan politik di masa lalu’ yang membentuk pengalaman ketertindasan bersama telah menjadi latar belakang yang menentukan bagi munculnya kebangkitan identitas adat di Indonesia. *Kedua*, adanya inspirasi dan dukungan organisasi-organisasi internasional, baik gerakan yang berjuang bagi hak-hak masyarakat adat (*indigenous peoples*) untuk menuntut pengakuan hak-hak tradisional atas tanah dan hak menentukan nasibnya sendiri (gerakan *indigenisme* internasional). *Ketiga*, warisan-warisan ideologis, bersifat historis, dan terletak dalam peran yang telah dimainkan oleh adat dalam imajinasi sosial dan politik mereka di Indonesia. *Keempat*, yaitu peluang-peluang dan tuntutan penting dari reformasi yang terkait dengan sejarah politik dan ekonomi Indonesia belakangan ini. Berakhirnya sistem negara yang sentralistik, kebijakan desentralisasi dan munculnya UU Otonomi Daerah tahun 2000,

⁵³ Taufiq Tanasaldy, Tulisan “Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat”, dalam *Politik Lokal di Indonesia*, Henk Schult Nordholt, dkk. (ed.), alih bahasa: Bernard Hidayat, (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), hal. 461-490.

⁵⁴ Baca, David Henley dan Jamie Davidson, “*Pendahuluan: Konservatisme radikal-Aneka wajah politik Adat*”..., hal. 6-25.

memberikan kesempatan khusus bagi pembaruan kelembagaan adat di daerah-daerah. Namun berakhirnya negara yang sentralistik menjadi sebuah persoalan baru, berhubungan dengan pertanyaan siapa yang akan mengontrol dan mengendalikan sumber daya daerah yang kini dapat diakses. Oleh karena itu dalam konteks ini, sering kali adat bisa menjadi alat yang dimanfaatkan sebagai jalan untuk memperoleh posisi-posisi yang menguntungkan dalam perebutan kekuasaan di daerah.

2.2.2. Politik Identitas Sunda

Mengenai istilah “Identitas Sunda” adalah identitas komunitas yang merujuk pada ‘komunitas adat Sunda’ yaitu digunakan untuk kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur dan berusaha mempertahankan warisan masa lalu leluhur mereka di wilayah geografis tertentu, serta memiliki karakteristik-karakteristik sistem nilai, sosial, politik, ekonomi dan budaya yang khas dalam masyarakat Pasundan.

Dalam kebangkitan politik identitas Sunda, berkembang asumsi, bahwa dari segi kultural, ekonomi dan politik, yang sejak Orde Baru merasa terpinggirkan dari pentas politik pusat. Kini di era pasca reformasi mulai banyak tumbuh organisasi-organisasi social kemasyarakatan yang menampilkan diri

sebagai representasi komunitas etnik Sunda untuk memperjuangkan hak-hak politik dan budaya masyarakat Sunda.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Kualitatif

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk memahami fenomena sosial dan budaya, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini lebih difokuskan untuk meneliti politik identitas Sunda: dalam pergulatan kebudayaan dan politik kekuasaan. Miles dan Huberman mengatakan bahwa data kualitatif merupakan sumber deskripsi yang luas dan memuat penjelasan mengenai proses yang terjadi dalam ruang lingkup setempat.⁵⁵

Pendekatan kualitatif dipilih karena beberapa alasan. *Pertama*, dalam penelitian kebudayaan, yang perlu dikaji adalah makna. *Kedua*, penelitian kualitatif memberikan peluang bagi pengkajian mendalam terhadap sebuah fenomena.

3.2. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah Institusi-institusi sosial kesundaan yang mengonsolidasikan diri dalam rangka memperjuangkan identitas kesundaan. Dari berbagai Instisusi yang ada, peneliti memilih dua institusi yang menurut hemat

⁵⁵ Miles dan Haberman, *Analisa Data Kualitatif*, (Jakarta: UI, 1992), hal.1

penulis memiliki pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat Sunda, yaitu: PAGUYUBAN PASUNDAN, dan Barisan Olot Tatar-Sunda (BOTS).

3.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen primer tentang dua organisasi social dan budaya, yaitu PAGUYUBAN PASUNDAN, dan Barisan Olot Tatar-Sunda (BOTS). Baik berupa buku-buku, majalah, arsip dan dokumen tentang dua organisasi tersebut. Data Primer diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam dan luas, sehingga informasi tersebut bisa menjadi sumber data penelitian.

Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk melengkapi dan mempertajam kecenderungan yang muncul dari data primer. Data sekunder ini bisa diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, dokumentasi-dokumentasi, arsip-arsip, data dari dinas-dinas pemerintah, dan kumpulan kliping koran yang memberikan informasi penunjang terkait tema penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data primer dan sekunder, peneliti mengumpulkan buku-buku, jurnal ilmiah, dokumentasi-dokumentasi, arsip-arsip baik dari perpustakaan maupun kesekretariatan dua institusi kesundaan tersebut, serta mencari data-data dari dinas-dinas pemerintah. Peneliti juga mempunyai kumpulan kliping koran tahun 2011 dan 2012 yang mungkin berhubungan dengan fokus penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Prosedur analisis data dilakukan baik dalam pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai. Pengolahan data terlebih dahulu dengan mendeskripsikan data sekunder dan primer. Mula-mula data diklasifikasi, diverifikasi, diinterpretasi, lalu dianalisis sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Hal ini dilakukan sebagai proses menyederhanakan dan menjelaskan bagian dari keseluruhan data melalui langkah klasifikasi dan kategorisasi sehingga dapat tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis.

Dalam analisis data kualitatif, pada dasarnya data yang muncul berupa kata-kata bukan rangkaian angka-angka. Prosedur analisis data yang ditempuh adalah melalui reduksi data (*data reduction*), sajian data (*data display*) dan pengambilan kesimpulan (*conclusion drawing*). Reduksi data

berkaitan dengan tujuan penelitian, sajian data berkaitan dengan penggunaan narasi, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan setelah data terkumpul yang selalu diverifikasi selama penelitian berlangsung.⁵⁶

Klasifikasi diperlukan dalam rangka membangun jaringan antar konsep untuk kepentingan menyusun tipologi yang relevan dengan tujuan penelitian. Reduksi dilakukan secara bertahap samapai laporan akhir lengkap tersusun.

Penyajian data dengan cara menyusun sekumpulan informasi menjadi suatu pernyataan atau narasi, hal ini dilakukan mengingat data yang berbentuk teks mulanya berpeccar dan terpisah menurut sumber informasi dan saat informasi itu diperoleh sehingga perlu dikategorisasi menurut kebutuhan analisis. Hasil kategorisasi tersebut, digambarkan dalam bentuk penarasian atau pengungkapan verbal sebagai ciri khas penelitian kualitatif.

Dari narasi tersebut disimpulkan sebagai bagian dari temuan penelitian. Pengambilan kesimpulan ini dilakukan setelah data terkumpul, yang selalu diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dari yang awalnya bersifat longgar sampai kemudian diringkas menjadi lebih rinci.

⁵⁶ Miles dan Huberman, *Analisa Data Kualitatif...*, hal. 16-20

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

POLITIK IDENTITAS SUNDA: PERGULATAN IDEOLOGI KEBUDAYAAN DAN POLITIK KEKUASAAN

4.1. GAMBARAN UMUM POLITIK IDENTITAS SUNDA

Menguatnya gejala politik identitas terutama akhir-akhir ini, lebih banyak dipengaruhi kepentingan politik praktis. Karena dasar kemajuan dalam ikatan persatuan dan kesatuan dalam “*nation*” tidak pernah tuntas dalam proses pendefinisian tentang identitas ke-Indonesia-an. Akibatnya akan selalu muncul fenomena merebaknya respon-respon kultural di sejumlah daerah dengan persoalan baru terkait munculnya identitas agama, atau etnisitas.

Politik identitas dalam bentuk apa pun tidak akan membahayakan keutuhan bangsa dan negara ini di masa depan, selama cita-cita para pendiri bangsa tentang persatuan dan integrasi nasional, semangat Sumpah Pemuda dan Pancasila sebagai dasar filosofi negara tidak dibiarkan menjadi konsep yang memenara gading, namun perlu dihayati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, politik identitas tidak selalu dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan bangsa, melainkan ia dapat

menjadi sebuah potensi untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui kemampuan untuk mengaplikasikan semangat Bhineka Tunggal Ika dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁷

Identitas Sunda adalah identitas komunitas yang merujuk pada ‘komunitas adat Sunda’ yaitu digunakan untuk kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur dan berusaha mempertahankan warisan masa lalu leluhur mereka di wilayah geografis tertentu, serta memiliki karakteristik-karakteristik sistem nilai, sosial, politik, ekonomi dan budaya yang khas dalam masyarakat Pasundan.

Dalam kebangkitan politik identitas Sunda, berkembang asumsi, bahwa dari segi kultural, ekonomi dan politik, yang sejak Orde Baru merasa terpinggirkan dari pentas politik pusat. Kini di era pasca reformasi mulai banyak tumbuh organisasi-organisasi social kemasyarakatan yang menampilkan diri sebagai representasi komunitas etnik Sunda untuk memperjuangkan hak-hak politik dan budaya masyarakat Sunda.

Disamping juga, masyarakat dari berbagai Suku Bangsa di Indonesia termasuk di dalamnya etnis Sunda saat ini tengah

⁵⁷ Ahmad Syafii Maarif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta, Democracy Project, 2012, halm. 77.

merasakan mulai tercabut akar budayanya. Masyarakat Sunda dengan Jatidiri Sunda pelan-pelan diserbu budaya baru yang cenderung egosentris, materialistis dan individualistis. Budaya baru yang menggerogoti sikap bersahabat, ramah dan terbuka dalam pergaulan Masyarakat Sunda yang terkenal dengan *someah hade ka semah* atau dalam arti ramah dan baik terhadap tamu.

Sebenarnya beberapa organisasi kesundaan sudah lahir sejak kemerdekaan, namun pasca reformasi semakin banyak bermunculan organisasi-organisasi kemasyarakatan dengan identitas kesundaan. Kalaupun yang sudah lama berdiri, pasca reformasi berusaha berubah visi dan orientasinya, mulai memperbincangkan kembali tentang orientasi kekuasaan, terutama isu tentang kepemimpinan Sunda untuk pentas politik Indonesia. Data yang terdapat pada Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PPSS) ada sekitar 200 organisasi kesundaan di Jawa Barat, di antaranya ada yang berumur satu atau dua tahun lalu mati, ada juga yang puluhan, bahkan Paguyuban Pasundan menginjak usia 100 pada tahun 2013.⁵⁸ Berdasarkan data tersebut, kategori organisasi menurut bidangnya paling banyak untuk bidang seni, disusul bidang pendidikan, politik, ekonomi,

⁵⁸ <http://regional.kompasiana.com/2013/07/09/4-organisasi-sunda-kiwari-575636.html> diunduh tanggal 13 September 2013 jam 20.40 WIB.

dan budaya. Umumnya organisasi kesundaan mengedepankan bendera seni terdahulu, baru kemudian membuat spesifikasi pada bidang-bidang yang lain.

Diantara organisasi-organisasi kesundaan tersebut, diantaranya yang paling awal dan populer adalah Paguyuban Pasundan (PP) berdiri sejak 1913, satu-satunya organisasi kesundaan yang pernah aktif terlibat kegiatan politik praktis, 1919-1942. Setelah mengalami jatuh-bangun (1920-1930), organisasi ini berkibar di tingkat nasional. Setelah 17 Agustus 1945, banyak tokoh Pasundan menjadi menteri dalam penyelenggaraan pemerintah Republik Indonesia.⁵⁹

Kemudian pada tahun 1952, muncul Organisasi Daya Mahasiswa Sunda (Damas) Di Jawa Barat, yang menjadi tonggak pertama lahirnya organisasi pemuda yang berbasis kedaerahan. Muncul organisasi Mitra Sunda, lalu Nonoman Sunda, dan kemudian muncul organisasi-organisasi pemuda Sunda lainnya.⁶⁰ Pada tahun 1980 an, banyak alumni Damas yang manggung di berbagai lembaga birokrasi, dari Adjat Sudradjat, Arifin Yusuf, Cecep Rukmana, hingga Otje P. Djundjuna. Kegiatan Damas yang semula berfokus pada

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ <http://damassukabumie.wordpress.com/category/tak-berkategori/> diunduh 13 September 2013 jam 19.38 WIB

bidang politik, pendidikan dan budaya, belakangan justru menyempit pada penyelenggaraan Pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran.⁶¹

Pada awal kebangkitan Orde Baru, tahun 1966, Angkatan Muda Siliwangi (AMS) didirikan, dengan pendiri antara lain Tato Braja Manggala, tujuannya untuk meningkatkan kewaspadaan pascapergerakan PKI. Pemuda AMS melawan gerakan PKI melalui konsolidasi kekuatan Orde Baru. AMS merupakan mitra TNI AD dengan struktur organisasi TNI AD.⁶² AMS kemudian meredup dan kini masih eksis meski kurang begitu nampak kegiatan terkait dengan visi kesundaannya.

Pasca Reformasi semakin banyak lagi organisasi-organisasi kesundaan yang bermunculan, mulai dari Forum Ki Sunda (2001), Gema Jabar (2002) Badan Musyawarah Sunda/Bamus Sunda (2007), Sundawani (2007), Barisan Olot Tatar Sunda atau Duta Sawala (2010), Lembaga Bantuan Hukum Galuh Pakuan Padjajaran, Kasatria Soenda Padjajaran, Legiun Kujang, Galuh Pakuan dan lain sebagainya.

Deklarasi Forum Ki Sunda memproklamirkan diri sebagai Wahana Gerakan Budaya. Forum Ki Sunda ini

⁶¹ <http://regional.kompasiana.com/2013/07/09/4-organisasi-sunda-kiwari-575636.html> diunduh tanggal 13 September 2013 jam 20.40 WIB.

⁶² *Ibid.*,

dideklarasikan pada hari Jumat malam 26 Januari 2001 di Balai Pertemuan Bumi Sangkuriang Bandung. Forum Ki Sunda lahir dari kesadaran untuk menyelamatkan asset budaya santun yang mulai hilang di kalangan masyarakat Sunda. Selain itu juga untuk memperkuat kembali tali persaudaraan berdasarkan nilai-nilai budaya menuju Bangsa Indonesia yang kuat.⁶³ Sedangkan Gema Jabar, dibentuk tahun 2002, oleh sekelompok kecil masyarakat Sunda di Jakarta sebagai bentuk komitmen dan kepedulian terhadap pembangunan Jawa Barat. Gema Jabar memfokuskan upaya pengembangan sumberdaya manusia Jawa Barat, yang secara menurut penilaian mereka, masih memprihatinkan. Gema Jabar dalam gerakannya mengedepankan modernitas, paradigma, dan cara berfikir baru dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat. Gema Jabar rutin menggelar Pelatihan Kepemimpinan Putra Sunda, yang di dalamnya tak hanya diisi materi-materi pengenalan nilai dan etika kesundaan, tetapi juga pencerahan menarik tentang kepemimpinan Sunda.⁶⁴

Berbeda dengan Forum Ki Sunda dan Gema Jabar, Bamus Sunda lebih mempertegas tujuannya kearah konsolidasi

⁶³ “Forum Ki Sunda Sebagai Solusi Budaya” Republika, Senin 29 Januari 2001.

⁶⁴ <http://regional.kompasiana.com/2013/07/09/4-organisasi-sunda-kiwari-575636.html> diunduh tanggal 13 September 2013 jam 20.40 WIB.

politik dalam konteks kehidupan berbangsa, dimana lemahnya koordinasi dan komunikasi semua potensi yang ada dalam masyarakat sunda menjadi alasan berdirinya Bamus Sunda, sebuah badan koordinasi antar elemen dan organisasi kedaerahan sunda/kawargian. Berawal dari kelompok kecil yang terdiri dari aktifis organisasi kedaerahan/kasundaan di Jakarta, diantaranya : Mayjen Tb. Hasanuddin (YPJB), Mauriza Danubrata (Gema Jabar), Rauf Purnama (YPJB), Aa Dani Saliswijaya (Asgar Jaya), Martoyo Wiranatakusumah (RWB), Adang Daradjatun (Simpay Wargi Urang), Herman Afif (Gema Jabar) dan Djaka Badranaya. Kelompok kecil ini sejak bulan Desember 2007 sampai bulan April 2008 telah melakukan sosialisasi gagasan pembentukan Bamus Tatar Sunda kepada berbagai kawargian dan kalangan tokoh dan sesepuh sunda baik di Jakarta maupun di Jawa barat. Tepatnya tanggal 27 April 2008, di Hotel Ambhara, rangkaian sosialisasi gagasan BAMUS mencapai puncaknya ketika disepakati oleh semua unsur kawargian dan organisasi mengenai dua hal penting: Pertama, pembentukan Badan Musyawarah Masyarakat Tatar Sunda dan kedua, memberikan kesempatan kepada H. Adang Daradjatun untuk memimpin Badan ini masa bhakti 2008-2011.⁶⁵ Saat ini yang menjadi Ketua Bamus

⁶⁵ <http://www.bangadang.com/organisasi/bammus-sunda> diunduh 13
61

Sunda Pusat adalah Syarif Bastaman. Dan Bamus Sunda sudah mulai ada di tiap provinsi, kota/kabupaten, hingga di luar negeri, agar koordinasi dan konsolidasi bisa dilakukan secara simultan.

Kebangkitan politik kebudayaan juga dialami oleh kelompok-kelompok kampung adat di Jawa Barat. Apabila organisasi-organisasi diatas, para pendiri dan aktifisnya kebanyakan dari kalangan elit atau menak, maka para ketua adat melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan mendirikan Barisan Olot Tatar Sunda/Duta Sawala yang merekomendasikan H. Eka Santosa sebagai Sekjen Duta Sawala sejak 2 Mei 2010 dan dideklarasikan pada 20 Mei 2010 dengan Pasir Impun sebagai basis sekretariat mereka. Duta Sawala bertujuan untuk memperjuangkan agar masyarakat adat Tatar Sunda bisa diterima secara luas. Diberikan wewenang menyusun, membuat struktur serta program kerja sesuai kebutuhan. Oleh karena itu ada tiga prioritas tugas pokok, Pertama, memperjuangkan pengakuan dan kesamaan. Kedua, pemberdayaan masyarakat adat. Ketiga, advokasi masyarakat adat.

Dari berbagai organisasi-organisasi kesundaan tersebut, dua organisasi yaitu Paguyuban Pasundan dan Barisan Olot

Tatar Sunda/ Duta Sawala yang akan dipaparkan. Yang satu mewakili organisasi yang dibentuk dari kalangan elit, dan yang terakhir mewakili organisasi dari kelompok masyarakat kampung adat. Keduanya sama-sama bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat Sunda.

4.2. SEJARAH BERDIRINYA PAGUYUBAN PASUNDAN DAN BARISAN OLOT TATAR SUNDA

4.2.1. Sejarah Paguyuban Pasundan

Setelah runtuhnya Kerajaan Sunda (1579), orang Sunda selalu mengalami keprihatinan sepanjang perjalanan sejarah mereka. Sejak itu berbagai pengaruh yang silih berganti datang dari luar secara fisik dan budaya dalam jangka waktu relatif singkat. Demikian besar desakan budaya luar itu menyebabkan beberapa unsur budaya Sunda yang telah mapan (bahasa, aksara, sastra, agama) terpinggirkan dan kemudian digantikan wujud dan perannya oleh unsur-unsur budaya baru. Lahirnya Paguyuban Pasundan (1913) yang didahului oleh berfungsinya kembali bahasa dan sastra Sunda, telah menjadi tonggak sejarah kebangkitan kembali eksistensi dan peranan orang Sunda di tengah-tengah lingkungan masyarakatnya sendiri dan masyarakat Indonesia yang multi-etnis dan multi-budaya. Sejak

itu orang Sunda sadar akan keberadaan dan posisi mereka dalam konteks masyarakat majemuk Indonesia.⁶⁶

Dalam *Verslag Pagoejoeban Pasoendan Taoen 1915* menjelaskan dan menyebutkan tentang waktu, tempat, latar belakang, dan tujuan didirikannya organisasi ini. Katanya: "Dina ping 20 Djoeli 1913 andjeuna ngadamel bijeenkomst di boemina D.K. Ardiwinata. Anoe saroemping harita seueur pisan sapertos moerid-moerid ti H.B.S., K.W.S., S.T.O.V.I.A. sareng istri-istri ti Bogor, goeroe-goeroe, sareng seueur-seueur deui. Dina eta bijeenkomst Dajat Hidajat njarioskeun naon margina andjeunna hojong ngadamel ieu pagoejoeban Saparantos kahartos koe sadajana, ladjeng harita rempag pikeun ngadamel pagoejoeban. Kalawan pirempag sadaya eta pagoejoeban dingaranan Pasoendan. Harita keneh ladjeng ngadamel voorloopig statuten sareng milih Bestuur.". Dari informasi tersebut jelas sekali bahwa Paguyuban Pasundan didirikan pada tanggal 20 Juli 1913 sebagai hasil pertemuan sejumlah orang Sunda (siswa-siswa HBS, KWS, dan STOVIA, guru-guru, wanita, dan lain-lain yang bertempat tinggal di Jakarta dan Bogor) di rumah D.K. Ardiwinata dengan alamat Gang Paseban, Weltevreden (sekarang daerah Salemba, Jakarta

⁶⁶ Edi S. Ekadjati, *Kebangkitan Kembali Orang Sunda: Kasus Paguyuban Pasundan 1913-1918*, Bandung: Kiblat 2004. hal. 70.

Pusat), Jakarta.⁶⁷

Pada bulan Juli 1913 para siswa STOVIA asal Sunda bersama-sama sering memikirkan nasib orang Sunda. Mereka bersepakat untuk mendirikan perkumpulan khusus bagi orang Sunda atau orang yang mencintai tanah Sunda. Adapun maksudnya ialah agar segenap orang Sunda bersatu, mencintai tanah air, bahasa, kebudayaan, dan kehidupan masyarakatnya, serta mau mengejar kemajuan. Pada suatu hari waktu bersekolah, bertempat di salah satu ruangan di kompleks STOVIA Mas Dayat Hidayat mengajak sesama teman-nya untuk bermusyawarah dan hasilnya menyepakati untuk mendirikan sebuah organisasi bagi orang-orang Sunda.⁶⁸

Organisasi ini bertujuan untuk memajukan orang Sunda agar meningkat kesejahteraan mereka; yang akan ditempuh dengan cara turut serta bersama pemerintah dalam upaya memajukan pengetahuan dan kehidupan masyarakat serta memperbaiki perilaku dan perbuatan mereka melalui penerangan, dan mencerdaskan pikiran mereka agar meningkat kreativitas dan etos kerja mereka sehingga akhirnya akan bertambah kesejahteraan hidup mereka. Dr. Junjunan Setiakusumah, sebagai pendiri dan Sekretaris pertama

⁶⁷ Edi S. Ekadjati, *Kebangkitan Kembali Orang Sunda...*, hal.37-38

⁶⁸ Edi S. Ekadjati, *Kebangkitan Kembali Orang Sunda...*, hal.54

pengurus organisasi ini, masih mengingat tujuan organisasi ini sewaktu dibicarakan pertama kalinya, yaitu (1) memuliakan bahasa dan budaya Sunda, (2) memajukan ilmu pengetahuan dari bahasa Belanda, (3) memajukan derajat dan pengetahuan orang Sunda, dan (4) tidak ikut dalam memerintah negara. Dari rumusan tujuan tersebut diatas, pada dasarnya pendiri, pengurus, dan anggota Pangunyuban Pasundan bermaksud memajukan taraf hidup orang Sunda yang mencakup pengetahuan, kebudayaan, etos kerja, dan kesejahteraan.⁶⁹

Sedangkan Aktivitas yang dilakukan oleh Paguyuban Pasundan hingga tahun 1918 terdiri atas (1) penerbitan majalah bulanan berbahasa Sunda *Papaes Nonoman* yang terbit sejak bulan Februari 1914 dan penulisnya berasal dari kalangan pengurus sendiri, anggota organisasi, orang Sunda lainnya, dan orang lain yang bukan orang Sunda, (2) kursus bahasa Belanda di Jakarta, Bogor, Pandeglang, Bandung, dan lain-lain yang diikuti oleh anggota organisasi dan orang pribumi lain dengan pengajar orang pribumi dan orang Belanda, khusus di Jakarta dinamai *Pasoendaivati* (baca: *Pasundawati*), (3) menyelenggarakan pertemuan, diskusi, dan ceramah yang membahas berbagai topik yang bertalian dengan bahasa, sastra, kebudayaan, dan berbagai masalah yang dihadapi oleh orang

⁶⁹ Edi S. Ekadjati, *Kebangkitan Kembali Orang Sunda...*, hal.56

Sunda dan orang pribumi Indonesia pada umumnya, (4) menyediakan fasilitas dan tempat pertemuan para anggota di Jakarta dengan nama *Societeit Pasoendawati*, (5) Menyelenggarakan rapat pengurus (*bestuur vergadering*) dan rapat anggota (*algemeene vergadering*) baik tingkat pusat maupun tingkat cabang di beberapa tempat di tanah Sunda, (6) melakukan kegiatan bersama dengan perkumpulan-perkumpulan lain dalam menghadapi masalah bersama, seperti dalam hal tuntutan pertahanan Hindia yang melibatkan bangsa pribumi (*Indic Weerbaar*), Komisi Peninjauan Kembali Dasar Sistem Kenegaraan Pemerintah Hindia Belanda (*Commissie ter herziening der grondslagen van Nederlandsch-Indie Staatskundige Inrichting*), kelompok Persatuan Kekuatan Rakyat (*Radicale Concentratie*).⁷⁰

Sejak tahun 1918 ketika organisasi-organisasi pribumi mulai mengarahkan perhatian dan kegiatannya ke lapangan politik dalam rangka mengantisipasi berdirinya Volksraad. Paguyuban Pasundan pun atas usul para anggotanya mengubah, sesungguhnya lebih tepat dikatakan menambah, siasat dan bidang kegiatan organisasinya dengan turut serta menempuh lapangan politik.

⁷⁰ Edi S. Ekadjati, *Kebangkitan Kembali Orang Sunda...*, hal.68

4.2.4. Sejarah Barisan Olot Tatar Sunda

Pada Tanggal 2 Mei 2010, para tokoh komunitas adat tatar Sunda mengadakan pertemuan di Pasir Impun Bandung. Mereka menginventarisir permasalahan-permasalahan terkait masyarakat adat. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh komunitas adat, misalnya di Kampung Naga – Tasikmalaya mereka merasa hanya dimanfaatkan dalam bidang pariwisata, perlunya satu jembatan untuk mengatasi/menyampaikan aspirasi dan keluhan pada pemerintah. Di Kampung Adat Cikondang-Bandung, mereka dianggap merusak vegetasi di hulu sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir di Bandung. Di Kampung Adat Dukuh-Garut Selatan, mereka merasa program pemerintah tidak tepat sasaran bagi masyarakat adat. Di Kampung Adat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu-Indramayu, ada masalah hak – hak sipil, seperti: KTP, Pernikahan, Akta kelahiran dan sebagainya. Di Kampung Adat Kuta-Ciamis, kesulitan mempertahankan amanat leluhur, hutan dijaga oleh masyarakat namun air dari resapan hutan tersebut tidak dirasakan masyarakat kuta, permasalahan hutan lindung yang semakin berkurang luasnya. Di Kampung Akur Sunda-Cigugur Kuningan, mengalami pembunuhan karakter terhadap komunitas adat melalui media (terutama media televisi), ada masalah hak Sipil, yang belum

merata dirasakan oleh kaum penganut Kepercayaan Adat, stigmatisasi “sejarah masa lalu” yang masih berlangsung sampai sekarang oleh kelompok keagamaan dan pemerintahan daerah setempat terhadap eksistensi keharmonisan Komunitas AKUR yang beragam dalam keyakinan.⁷¹

Setelah munculnya beberapa permasalahan yang dihadapi oleh komunitas-komunitas adat, mereka sepakat untuk membentuk suatu ikatan bersama, yang diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh komunitas adat, khususnya di Tatar Sunda. Ikatan tersebut diterjemahkan melalui pembentukan suatu badan yang bernama: “Badan Musyawarah Tetua Masyarakat Adat Tatar Sunda” yang kemudian dikenal dengan “Barisan Olot Tatar Sunda” atau “Duta Sawala”. Ada beberapa keputusan yang dihasilkan yaitu:⁷²

- a. Para Tetua adat sepakat untuk memberikan mandat kepada Eka Satosa sebagai Sekjen Badan Musyawarah Tetua Masyarakat Tatar Sunda.
- b. Penerima Mandat diberikan kewenangan untuk membuat dan menyusun struktur, serta program kerja sesuai kebutuhan, dengan tetap berkoordinasi dengan pemberi

⁷¹ Dokumen Hasil Rapat Para Tokoh Komunitas Adat tanggal 2 Mei 2010 di Pasir Impun Bandung.

⁷² *Ibid.*,

mandat.

- c. Para Tetua adat yang hadir sepakat untuk tetap membuka diri bagi komunitas adat lainnya, yang belum bergabung, untuk bergabung dalam badan tersebut.
- d. Mensosialisasikan hasil pertemuan tanggal 2 Mei 2010, kepada komunitas adat yang tidak sempat hadir dalam pertemuan sebelumnya.
- e. Mempersiapkan substansi acara dan persiapan acara deklarasi adat yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2010.

Pada awal pembentukannya ada tiga tujuan mendasar yang harus diperjuangkan oleh Barisan Olot Tatar Sunda atau Duta Sawala ini, yaitu: Pertama, eksistensi Masyarakat Adat. Kedua, Pemberdayaan Masyarakat Adat, dan ketiga adalah Advokasi.⁷³

Eksistensi Masyarakat Adat, terdiri dari:

- 1) Pengembangan dan kebebasan mengespresikan nilai-nilai kearifan budaya lokal.
- 2) Pengakuan, penghargaan dan penghormatan atas hak-hak hukum adat.
- 3) Pengakuan, penghargaan dan penghormatan atas hak-hak sipil dan nilai-nilai kepercayaan masyarakat adat.
- 4) Mengembangkan Sistem atau lembaga adat dalam proses kehidupan bermasyarakat.
- 5)

⁷³ *Ibid.*,

Kebebasan dalam mengembangkan dan mengekspresikan wujud kebudayaan sebagai hasil karya. 6) Menjamin hak kebudayaan dan intelektual. 7) Hak atas tanah dan sumber daya alam, yang termasuk dalam wilayah adat. 8) Hak keikutsertaan di dalam proses perundingan dan pengambilan keputusan yang relevan dalam berbagai tingkatan.

Pemberdayaan Masyarakat Adat, terdiri dari: 1) Pembangunan ekonomi berbasis lokal. 2) Mengembangkan cara-cara pemecahan persoalan kelestarian lingkungan yang disepakati secara lokal. 3) Meningkatkan kesehatan masyarakat adat serta mengembangkan teknik pengobatan tradisional/lokal. 4) Mengembangkan dan meningkatkan peran wanita adat dalam proses pembangunan masyarakat. 5) Memfasilitasi serta memberi pelatihan kepada masyarakat adat untuk mengembangkan kemampuan berfikir, berpendapat, berkumpul dan berserikat. 6) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat adat serta mengembangkan sistem pendidikan berbasis lokal. 7) Pengembangan sumber daya alam yang berbasis pada kedaulatan masyarakat adat. 8) Pengembangan masyarakat melalui penguatan kesenian masyarakat adat.

Sedangkan Advokasi meliputi pengadvokasian terhadap permasalahan Masyarakat Adat dalam kaitan dengan persengketaan dan ketidakharmonisan antara kebijakan

peraturan pemerintahan Negara dengan aturan adat, seperti: 1) Advokasi masalah sengketa Hak Tanah Ulayat/ Awisan. 2) Advokasi masalah hak-hak Sipil. 3) Advokasi masalah Penodaan dan Pelanggaran Adat oleh pihak luar Adat. 4) Advokasi masalah Peminggiran Hukum Adat oleh kebijakan politis pemerintah dan sebagainya.

Sebagaimana yang sering diungkapkan oleh Sekjen Duta Sawala dalam pidatonya, misalnya ketika menghadiri acara Seren Taun di Cigugur Kuningan pada tanggal 29 Nopember 2010. “Berdasarkan titah tetua adat, Duta Sawala bertugas memperjuangkan agar masyarakat adat Tatar Sunda bisa diterima secara luas. Diberikan wewenang menyusun, membuat struktur serta program kerja sesuai kebutuhan”. Eka memprioritaskan tiga pokok. Pertama memperjuangkan pengakuan dan kesamaan. Kedua, perlunya pemberdayaan masyarakat adat. Ketiga, perlu advokasi. Selama ini masyarakat adat di sekitar hutan, mengeluh soal hak tanah yang berbatasan dengan Perhutani. Selanjutnya dia mengatakan “Masyarakat adat taat dan patuh kepada ciri sabumi dan cara sadesa karena ada keberagaman dalam kehidupan. Melalui pemahaman nilai-nilai tradisional, kita kembali ke jati diri. Selain itu, juga tetap memperjuangkan dan mempertahankan empat pilar negara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika,

Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁷⁴

4.3. PERGULATAN POLITIK DAN KEBUDAYAAN PAGUYUBAN PASUNDAN DAN BARISAN OLOT TATAR SUNDA.

4.3.1. Pergulatan Politik dan Kebudayaan Paguyuban Pasundan

Berdasarkan putusan no. 72 Tanggal 13 Juni 1919, Paguyuban Pasundan (PP) merubah anggaran dasar untuk menjadi perkumpulan politik. Terjadi perubahan pengurus, posisi yang tadinya dijabat D.K. Ardiwinata digantikan R. Poeradireja, kemudian dilanjutkan oleh R. Soeria di Radja, serta R. Otto Koesoemabrata. Pada masa kepemimpinan R. Poeradiredja (1921-1924) PP mulai menempatkan perwakilannya di Volksraad, yaitu R. Kosasih Soeratakoesoemah, seorang Guru pertanian dari Bandung. Ketika R. Otto Koesoemabrata menjabat ketua PP, beliau turut diangkat sebagai anggota Volksraad. Ketika melepaskan jabatan ketua PP, sisa masa kepemimpinannya dilanjutkan oleh R. Idih Prawira di Poetra. Setelah itu barulah tampuk ketua diisi oleh R. Otto Iskandar di Nata. Dalam kepemimpinannya,

⁷⁴<http://newspaper.pikiranrakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=165975> diunduh tanggal 11 september 2013 jam 20.29 WIB.

ketika kantor pusat masih terletak di Petodjodwarsweg (Batavia), jabatan pengurus PP diisi oleh: Atik Soeardi (Wakil ketua), Moehammad Moehjiddin (Sekretaris), Pradjakoesoemah (Bendahara), R. Loekman Dajadiningrat, R. Moehammad Enoch, R. Enoeh dan R. Ahmad Atmadja (Komisaris). Beberapa waktu kemudian posisi sekertaris digantikan oleh Ir. R. Djoeanda, R. Enoeh oleh E. Soeparman, sedangkan Komisaris ditambah S. Soeradiredja. Ketika kantor pusat Paguyuban Pasundan dipindahkan ke Bandung (Dalem Kaumweg), susunan pengurusnya pun berubah. Ketua tetap R. Otto Iskandar di Nata, Wakil ketua : R.S. Soeradiradja, Sekertaris : Ir. R. Oekar Bratakoesoemah, Bendahara : Wiriaatmadja. Komisaris : R. Moehammad Enoch, R. Loekman Djajadiningrat, E. Soeparman dan R. Ahmad Atmadja.⁷⁵

Masih dalam kepemimpinan Otto Iskandar di Nata, Paguyuban Pasundan mencapai puncak perjuangan politiknya ditandai dengan berhasil masuknya wakil-wakil PP dalam dewan rakyat dari tingkat pusat hingga provinsi. Bidang pendidikan juga turut mengalami kemajuan setelah sebelumnya perintisan pendirian sekolah telah dimulai di awal tahun

⁷⁵<http://aleut.wordpress.com/2011/08/25/sejarah-singkat-organisasi-kasundaan-part-1/> diunduh tanggal 12 September 2013 Jam 21.24 WIB

1920an, antara lain H.I.S. (1922) dan M.U.L.O (1928) di Tasikmalaya. Perkembangan ini dilanjutkan dengan pendirian satu lagi H.I.S. di Tasikmalaya dan Bandung, Schakelschool di Kuningan dan Sukabumi, Inheemsche Muloschool dan sekolah Dagang di Bandung dan lain-lain. Di tahun 1930 an, sekolah Paguyuban Pasundan menyebar cepat ke berbagai kota, kawedanan, hingga kecamatan-kecamatan se-Jawa Barat. Bagian khusus yang mengurus pendidikan ini kemudian bernama Bale Pamulangan Pasundan yang dipimpin oleh Ahmad Atmadja.

Di bidang ekonomi, tahun 1934 didirikan Bank Pasundan yang kemudian berkembang menjadi Bale Ekonomi Pasundan yang dipimpin oleh R.S. Soeradiradja. Di bidang politik, organ PP yang khusus menangani ini pertama disebut Papaes Nonoman yang kemudian diganti menjadi “Pasundan”. Tanggal 20 April 1923, organ politik cabang Tasikmalaya mulai mengeluarkan mingguan Sipatahoenan. Pada tahun 1931, kantor Sipatahoenan dipindahkan dari Tasikmalaya ke Bandung, bertempat di percetakan “Pengharepan” di Oude Kerkhofweg (banceuy), yang kemudian pindah lagi ke Groote Postweg (Jl. Asia Afrika). Setelah tiga tahun, pengurus pusat PP lantas mendirikan “Gebouwen Complex Sipatahoenan’ di jalan Moskeeweg no. 42. Ketua PP berkantor di lantai atas

bangunan tersebut, sedangkan percetakan “Pengharepan” di no. 44, dan Kantor pengurus pusat di No. 46. Dari kompleks bangunan inilah kemudian diterbitkan harian “Sepakat” yang berbahasa Indonesia. Bidang-bidang Paguyuban Pasundan kemudian meluas lagi dengan didirikannya organ Adviesbureau, Reclasseering, Raksa Perlaya dan Pemuda Pasundan.

Pada tanggal 30 April 1930 didirikanlah badan yang lain, bernama Pasundan Istri di Gedung Himpunan Saudara, di Bandung. Ketuanya adalah Emma Poeradiredja (anak dari R. Poeradiredja), Sekertaris – Emma Somanagara, Bendahara – Oetari Satjadidjaja. Pasundan Istri adalah organisasi pertama yang mendorong pemerintah supaya memberikan hak memilih dan dipilih kepada kaum wanita. Walau sulit, pada 1938 akhirnya pemerintah memberi kesempatan kepada kaum wanita untuk duduk di dewan kotamadya (*Stadsgemeenteraden*). Pada akhir tahun 1930'an, jumlah perkumpulan wanita di Indonesia mencapai puncaknya yaitu 160 buah. Dan Pasundan Istri pada masa itu, berhasil membangun 28 buah cabang di beberapa kabupaten/kota.⁷⁶

Karena perjalanan politik tak pernah stabil, periode

⁷⁶<http://aleut.wordpress.com/2011/08/25/sejarah-singkat-organisasi-kasundaan-part-1/> diunduh tanggal 12 September 2013 Jam 21.24 WIB.

1949-1959, Paguyuban Pasundan terpecah dalam dua kekuatan politik, yaitu Partai Kebangsaan Indonesia, PARKI, yang dipimpin Suradiredja, dan Gerakan Pilihan Sunda, GERPIS, yang dipimpin Sutisna Sendjaja. Suradiredja adalah ketua umum Pasundan setelah terbunuhnya Oto Iskandardinata, tahun 1945, sementara Sutisna, adalah sekjen Pasundan tahun 1919. Dua partai yang mempresentasikan aspirasi politik masyarakat Sunda ini gagal bersaing dengan partai nasional pada pemilu pertama 1955. Kegagalan yang berdampak panjang hingga sekarang. Yakni, hilangnya peran politik Sunda di panggung politik nasional yang sedikit-banyak berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat Sunda.⁷⁷ Kalaupun ada tokoh Sunda yang muncul di kabinet, umumnya tak dianggap representasi Sunda, melainkan lebih sebagai profesional atau karena kedekatan dengan presiden berkuasa.

Setelah kekalahan dalam pemilu tersebut, PARKI dalam kongres luar biasa tahun 1959 mengubah namanya kembali menjadi Paguyuban Pasundan, kegiatan Paguyuban Pasundan kemudian lebih didominasi oleh aktivitas dalam bidang pendidikan dan sosial-budaya. Salah satu tonggak perjuangannya dalam bidang pendidikan adalah dengan

⁷⁷ <http://regional.kompasiana.com/2013/07/09/4-organisasi-sunda-kiwari-575636.html> diunduh tanggal 13 September 2013 jam 20.40 WIB.

didirikannya Universitas Pasundan di Bandung pada tanggal 14 November 1960. Kini Paguyuban Pasundan memiliki 32 kantor cabang dengan 492 anak cabang. Pelestarian kebudayaan Sunda di masa kini menjadi prioritas utamanya. Sekolah-sekolah Pasundan dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah bertebaran di wilayah Jawa Barat dan Banten. Sedang dalam jenjang pendidikan tinggi, Paguyuban Pasundan memiliki empat perguruan tinggi, yaitu: Universitas Pasundan di Bandung, Sekolah Tinggi Hukum (STH) Pasundan di Sukabumi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pasundan di Cimahi, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pasundan di Bandung.

Saat ini Ketua Umum Paguyuban Pasundan adalah Prof Didi Turmudzi, yang juga Rektor Universitas Pasundan. Konsentrasi Paguyuban Pasundan memang di pendidikan dan kebudayaan, namun harapan tentang kepemimpinan orang Sunda juga sangat kuat dalam komunitas Paguyuban Pasundan. Oleh karena itu, hampir dalam beberapa diskusi, seminar dan pertemuan-pertemuan bahasan tentang kepemimpinan Sunda selalu dikemukakan. Ketika berpidato pada Peringatan 100 Tahun (Milangkala Saabad) Paguyuban Pasundan di Gedung Sabuga Bandung, Selasa 20 Agustus 2013, Prof. Didi Turmudzi menuturkan tiga tokoh Sunda yakni Moh Jumbuh

Hidayat, Ginanjar Kartasasmita, dan TB Hasanudin, pantas menjadi calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2014. “Wajar jika ada yang punya keinginan tokoh Sunda jadi capres/cawapres seperti Jumhur Hidayat, TB Hasanudin dan Ginanjar Kartasasmita,” kata Prof. Didi. Tiga orang tersebut, kata Didi merupakan tokoh yang sudah populer di kalangan masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Moh Jumhur Hidayat saat ini menjabat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Ginanjar pernah menjabat menteri pada era Orde Baru dan pernah menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah 2004-2009, sedangkan TB Hasanuddin adalah anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan. Menurut dia, sangat pantas bila puncak kepemimpinan nasional pada 2014 mendatang, ditempati oleh tokoh Sunda karena Sunda merupakan etnis kedua terbesar di Indonesia. “Saya berharap wakil presiden yang akan datang berasal dari Jawa Barat atau etnis Sunda,” katanya. Sehingga pihaknya berharap seluruh warga Jawa Barat kompak dan saling mendukung karena krisis solidaritas kesukuan akan timbul jika hal itu tidak terwujud. “*Jadi ‘nu jauh urang deukeutkeun, nu deukeut urang layeutkeun, geus layeut urang paheutkeun’* (yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita akur bersama, setelah akur kita perkuat). Untuk bekerja

membangun Sunda, membangun Indonesia,” katanya⁷⁸

Semangat untuk mewacanakan kepemimpinan Sunda sering kali dilontarkan, tidak hanya sebagai Capres-Cawapres, termasuk juga dalam pengajuan menteri-menteri dan Gubernur haru dari orang Sunda. Pada saat Pilpres 2009 yang lalu misalnya, Paguyuban Pasundan bersama 12 organisasi kesundaan yang lain membentuk tim independen untuk merekomendasikan 160 tokoh Sunda Jawa Barat- Banten kepada capres-cawapres terpilih pada pilpres 2009. Hal ini dilakukan karena sekitar 20% penduduk Indonesia adalah orang Sunda. Di antara organisasi kesundaan tersebut, yaitu Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Angkatan Muda Siliwangi, Daya Mahasiswa Sunda (Damas), seniman Sunda, dan lain-lain. Di antara nama tokoh Sunda tersebut, terdapat nama Agus Gumiwang Kartasasmita, Abu Syauqi, Ahmad Heryawan, Adjeng Ratna Suminar, Dada Rosada, Itoc Tochija, Dede Yusuf, Uu Rukmana, Nu'man Abdul Hakim, Yoyo S. Adiredja, Iwan Sulandjana, dan lain-lain.⁷⁹

⁷⁸ <http://www.bisnis-jabar.com/index.php/berita/3-tokoh-sunda-ini-dinilai-pantas-jadi-caprescawapres> diunduh tanggal 11 September 2013 jam 19.46 WIB.

⁷⁹ <http://www.klikgalamedia.com/indexnews.php?wartakode=20090627163344&idkolom=beritautama> Diunduh tanggal 13 September 2013 jam 20.23 WIB.

4.3.2. Pergulatan Politik dan Kebudayaan Duta Sawala Barisan Olot Tatar Sunda

Duta Sawala memiliki agenda memperjuangkan kelompok-kelompok masyarakat Sunda khususnya yang terpencil dan terasing. Salah satu penggagas berdirinya Duta Sawala adalah Eka Santosa, dan sekretariatnya terdapat di Hutan Restorasi Alam Santosa, Pasir Impun, Bandung. Dalam draft Anggaran Dasar (AD) Duta Sawala dinyatakan bahwa Duta Sawala didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan: 1) Informasi-informasi; 2) Penyelesaian kasus-kasus persengketaan keadatan; 3) Penyelesaian pelanggaran hak-hak adat yang berat; 4) Pembelaan hukum; dan 5) Pengembangan. Sedangkan program yang dicanangkan adalah berkaitan dengan isu-isu pembuatan KTP (khususnya kolom ‘agama’), pernikahan, kematian, konservasi hutan, bencana alam, dan lain-lain. Namun sampai saat ini hanya kegiatan berupa pelayanan informasi, acara silaturahmi-silaturahmi, audiensi dengan Pemerintah Daerah dan pagelaran-pagelaran seni dan kebudayaan yang baru bisa dilaksanakan.

Pada tanggal 23 November 2010, setelah beberapa bulan terbentuk Duta Sawala Barisan Olot Tatar Sunda menghadap Gubernur Jawa Barat bertujuan memberikan masukan berupa “Uga dan Ketentuan Adat” yang berkaitan

tanda-tanda gejala dan fenomena bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai belahan Bumi Nusantara. Baresan Olot Tatar Sunda yang dalam hal ini merupakan Dewan Kasepuhan Masyarakat Adat Tatar Sunda merasa perlu untuk memberikan masukan, pandangan dan “warning” atau “peringatan berdasarkan uga/amanat leluhur Sunda” mengenai berbagai kemungkinan fenomena alam berikutnya yang kemungkinan akan terjadi dan bagaimana upaya mengatasinya terhadap fenomena alam yang sudah, sedang dan akan terjadi dalam perspektif “budaya kosmologi adat”. Hal ini perlu diungkapkan dan dijelaskan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai pemegang kebijakan penuh terhadap berbagai langkah-langkah strategis dan preventif yang harus dilakukan sebagai pimpinan daerah di Provinsi Jawa Barat, sehubungan dengan wilayah Jawa Barat khususnya, dan umumnya Jawa Barat dan Banten sebagai kawasan yang memiliki gunung dan pegunungan yang berpotensi terhadap gempa vulkanik serta dikelilingi lautan yang berpotensi terhadap munculnya gempa tektonik.⁸⁰

Kegiatan silaturahmi Duta Sawala Baresan Olot Tatar Sunda dengan Wakil Gubernur Dede Yusuf pada tanggal 20

⁸⁰ Dokumen Hasil Pertemuan dengan Gubernur pada tanggal 23 November 2010 di Gedung Sate Bandung.

September 2011 dengan tema Halal Bihalal Barisan Olot Tatar Sunda dengan Wakil Gubernur Jabar di Bale Gede Julang Ngapak, Pasir Impun, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Barisan Olot Tatar Sunda meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan agar eksistensi masyarakat adat tetap ada.

Kegiatan silaturahmi Duta Sawala Baresan Olot Tatar Sunda (Dewan Musyawarah Kasepuhan Masyarakat Adat Tatar Sunda) dengan Direktur Utama Pikiran Rakyat, Joko Hendarto serta jajaran pimpinan Pikiran Rakyat di aula kantor Pikiran Rakyat Jumat tanggal 4 Mei 2012 Jln. Asia Afrika 77. Pada silaturahmi kali ini Sekjen Duta Sawala Eka mengungkapkan kasus yang menimpa masyarakat adat di kawasan Banten Kidul di mana lebih dari 2.500 masyarakat adat di tiga Kasepuhan yang ada di wilayah Kab. Sukabumi Jawa Barat, terancam tergusur oleh adanya penetapan perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Padahal, sebelum diterbitkannya SK Menteri Kehutanan nomer 175 tahun 2003, ratusan tahun sebelumnya masyarakat adat sudah lebih dahulu menetap.⁸¹

Kegiatan Silaturahmi dan kunjungan Baresan Olot Tatar Sunda (BOTS) ke Redaksi Galamedia, Jln. Blk. Factory, pada

⁸¹ <http://www.pikiran-rakyat.com/node/187237> diunduh Minggu, 15 September 2013, jam 11.52 WIB.

hari yang sama yaitur Jumat malam tanggal 4 Mei 2012. Rombongan dipimpin Duta Sawala (Sekjen) BOTS, Eka Santosa. Mereka diterima oleh Direktur PT Galamedia Bandung Perkasa, D. Surachdin dan Pemred, Enton Supriyatna Sind. Eka didampingi Bah Dede (Panjalu), Bah Sahari (Baduy), Bah Ilin (Kampung Cikondang), dan Bah Sukarma (Rancakalong). Menurut Eka, kunjungan ke Redaksi Galamedia merupakan rangkaian dari roadshow untuk sosialisasi acara yang akan digelar BOTS. Yakni ritual Pinton Ajen Karancagean dan budaya masyarakat Tatar Sunda dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Rencananya kegiatan itu akan berlangsung mulai 28 Mei hingga 2 Juni di Alam Santosa Pasir Impun, Kab. Bandung. Acara ini rencananya akan dibuka langsung oleh Wakil Menteri (Wamen) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sapta Nirwandar. Kegiatan yang akan berlangsung selama enam hari ini juga akan mempertontonkan kesenian khas dari beberapa komunitas masyarakat adat. Di antaranya masyarakat adat Cigugur Kab. Kuningan, Kampung Naga di Kab. Tasikmalaya, Ciptagelar di Kab. Sukabumi, Kampung Dukuh di Kab. Garut dan Cikondang di Kab. Bandung, kesenian dari kampung adat Baduy Banten, serta penampilan seni tradisional masyarakat di wilayah Bandung Timur. Acara ini juga akan menampilkan berbagai macam

produk ekonomi kreatif, kerajinan hasil olah bumi, dan bentuk cipta karsa. BOTS juga akan memberikan penghargaan kepada Grup Pikiran Rakyat sebagai Jamparing Warti Linuhung. Selain itu, Menko Polhukam Joko Suyanto dengan gelar Lanang Sajagat Nusantara, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dr. Sapta Nirwandar, S.E. (Sinatria Cipta Karsa), Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (Lanang Raksa Budaya), dan Direktur PT Asi Pudjiastuti Aviation Susi Pudjiastuti (Wadona Pinujul).⁸²

Pada Hari Selasa 29 Mei 2012, dalam rangkaian acara Pinton Ajen Karancagean atau Festival Budaya Masyarakat Adat Tatar Sunda di Alam Santosa, Pasir Impun Kab. Bandung. Barisan Olot Tatar Sunda menyatakan program pengembangan ekonomi kreatif 2012-2014 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak tepat sasaran bagi masyarakat adat tatar Sunda. Datang sebagai perwakilan Menparekraf, Poppy Savitri dari Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek memaparkan orientasi program Kemenparekraf di hadapan tetua dan pemuka adat tatar Sunda, serta pemerhati budaya. Mereka menilai program yang dicanangkan kementerian, lebih menitikberatkan

⁸² <http://www.klik-galamedia.com/baresan-olot-tatar-sunda-kunjungi-redaksi-galamedia> diunduh 9 September 2013 jam 21.06 WIB.

pada produk cipta karya adat, berbentuk kerajinan atau kesenian. Padahal kreativitas mereka itu sebenarnya adalah pada bidang pertanian, hutan, dan air.⁸³

Pada hari Jumat sore tanggal 1 Juni 2012, masih dalam rangkaian acara Pinton Ajen Karancagean atau Festival Budaya Masyarakat Adat Tatar Sunda di Alam Santosa, Pasir Impun Kab. Bandung. Barisan Olot Tatar Sunda memanfaatkan betul kehadiran tokoh nasional Surya Paloh untuk mengadukan nasib mereka dan persoalan kampung adatnya bertepatan pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Tokoh yang digadagadang akan turut meramaikan bursa calon presiden pada 2014 nanti ini, setelah selesai orasi, lanjut mengikuti diskusi terbatas dengan empat belas tetua di ruang yang sama dengan acara orasi, Bale Julang Ngapak. Di awal acara, Surya Paloh dikukuhkan oleh para tetua menjadi warga kampung adat tatar Sunda. Mantan politisi Golkar ini memberikan respons keluhan dan harapan masyarakat adat dengan perspektif kenasionalannya. Tak lupa Surya Paloh pun menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya kepada para tetua adat yang telah

⁸³ <http://www.bisnis-jabar.com/index.php/berita/barisan-olot-tatar-sunda-kebijakan-kemenparekraf-tidak-tepat-sasaran> diunduh tanggal 10 September 2013 jam 20.11 WIB.

menjadikannya bagian dari masyarakat adat.⁸⁴

Pada bulan yang berbeda, ketika mendekati Pilgub Jabar 2013, tepatnya hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012.

Calon Wagub Jabar Lex Laksamana mendapat gelar kehormatan sebagai Masyarakat Adat Sunda dari Barisan Olot Tatar Sunda. Pada Pilgub Jabar mendatang Lex Laksamana akan mendampingi Calon Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf.

Penghargaan pada Lex Laksamana diberikana saat ia membuka acara Pinton Ajen Masyarakat Adat. Sebagai simbol penerimaan terhadap Lex sebagai warga Jabar, Sekjen Masyarakat Adat Tatar Sunda Eka Santosa memakaikan iket (ikat kepala batik khas Sunda) di kepala mantan Sekda Provinsi Jabar itu. Lex menyatakan rasa terima kasihnya telah dipercaya sebagai warga Sunda.⁸⁵ Acara tersebut juga dihadiri oleh Dede Yusuf, lengkap sudah pasangan yang diusung Demokrat, PAN, PKB dan Gerindra ini disambut sejumlah tokoh dari barisan Olot dan Adat Sunda. Di acara itu hadir tokoh dari Rancakalong, Paguyuban Pasundan, Badan Musyawarah (Bamus) Sunda, Kampung Naga, Geger Sunten Ciamis, Banten

⁸⁴ <http://www.bisnis-jabar.com/index.php/berita/barisan-olot-tatar-sunda-mengadu-kepada-surya-paloh> diunduh tanggal 10 September 2013 jam 19.51 WIB.

⁸⁵ <http://www.dedeyusuf-laksamana.com/2013/01/lex-laksamana-dapat-gelar-kehormatan-dari-barisan-olot-tatar-sunda/> diunduh tanggal 09 September 2013 jam 19.08 WIB.

Kidul, dan lain-lain. Dede mengaku mendatangi acara itu dalam kapasitas sebagai wakil gubernur yang ditugaskan membuka acara Pinton Ajen.⁸⁶

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Duta Sawala Barisan Olot Tatar Sunda semakin mengarah ke politik praktis, sejak H. Eka Santosa selaku Sekjen Duta Sawala Barisan Olot Sunda menjadi Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat bersamaan dengan ORMAS NASDEM berubah haluan menjadi Partai Politik. Hal ini semakin dipertegas dengan pertemuan Para ketua Adat Tatar Sunda pada tanggal 13 Agustus 2013 di Bale Gede Julang Ngapak kawasan Hutan Restorasi Alam Santosa jalan Pasir Impun Atas Kabupaten Bandung. Menurut Eka Santosa, Barisan Olot Tatar Sunda (BOTS) bermetamorfosis menjadi Barisan Olot Masyarakat Adat (BOMA) Jabar atas keinginan para tetua adat untuk memperluas jangkauan himpunannya di Jawa Barat.

Baresan Olot Masyarakat Adat (BOMA) Jawa Barat terbentuk 13 Agustus 2013, ikatan baru ini terdiri atas 22 Kasepuhan Masyarakat Adat (KMA) di Jawa Barat, sebanyak 9 Kampung Adat dari 22 Kampung Adat merupakan embrio BOMA Jabar yang selama ini tergabung dalam Baresan Olot Tatar Sunda

⁸⁶ <http://m.merdeka.com/politik/dede-yusuf--lex-laksamana-mulai-dekati-tokoh-jabar.html> diunduh tanggal 9 September 2013 jam 21.39 WIB.

(BOTS) yang berdiri sejak 20 Mei 2010.

Dalam deklarasi BOMA Jabar akhirnya terpilih Ketua Harian BOMA Jabar yaitu Jajang dari Kampung Adat Sanaga (Kab. Tasikmalaya), Jajang akan memegang jabatan ini selama dua tahun dengan sifat kepemimpinan *Collective Collegial*.

Berikut ke 22 Kasepuhan Masyarakat Adat yang tergabung dalam BOMA Jabar:

1. Kampung Adat Sanaga (Kab. Tasikmalaya)
2. Kampung Adat Dukuh (Kab. Garut)
3. Kampung Adat Kuta (Kab. Ciamis)
4. Kampung Adat Cikondang (Kab. Bandung)
5. Kampung Adat Ranca Kalong (Kab. Sumedang)
6. Kampung adat Geger Sunten (Kab. Ciamis)
7. Kampung Adat Cipta Gelar (Kab. Sukabumi)
8. Kampung Adat Cipta Mulya (Kab. Sukabumi)
9. Kampung Adat Sinar Resmi (Kab. Sukabumi)
10. Kampung Adat Kawali (Kab. Ciamis)
11. Kampung Adat Cibongas (Kab. Garut)
12. Kampung Adat Kandang Wesi (Kab. Garut)
13. Kampung Adat Batu Wangi (Kab. Garut)
14. Kampung Adat Cigondewah (Bandung)
15. Kampung Adat Mahmud (Kab. Bandung)
16. Kampung Adat Bumi Alit (Kab. Bandung)
17. Kampung Adat Ci Ela (Kab. Garut)
18. Keprabonan Sumedang Larang (Kab. Sumedang)
19. Kampung Adat Situs Dangi (Kab. Garut)
20. Kampung Adat Pulo (Kab. Garut)
21. Kampung Adat Sancang (Kab. Garut)
22. Kampung Adat Cibodas (Kab. Ciamis)

“Saya sudah membuat *MoU* dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh”, kata Ketua Harian BOMA Jabar Jajang, “Surya Paloh berharap Barisan Olot menjadi kader-kader Partai Nasdem” katanya lagi.

Duduk sebagai Dewan Pangaping BOMA Jabar sekaligus Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Eka Santosa. Eka menjelaskan bahwa adat istiadat adalah akar budaya bangsa dan merupakan kekayaan bangsa Indonesia, serta melahirkan bangsa Indonesia dengan kebhinekaan, “Adat istiadat ibaratnya sebuah akar dan negara adalah pohon”, ungkap Eka, “Undang-undang perlindungan masyarakat adat harus diperjuangkan di DPR RI”, tegasnya. “Saat ini ada kegalauan nasib budaya bangsa”, kata Eka, “Perjuangan budaya tidak cukup hanya di ranah budaya, harus pula dilakukan di ranah pemerintah dan ranah politik”, tegas Eka, “Partai Nasdem adalah partai berbasis perubahan budaya, dan di tahun 2018 memiliki agenda besar bertema Nasdem untuk Jawa Barat”, ungkapnya.⁸⁷

Tentu saja pilihan politik ini tidak berjalan mulus disepakati oleh semua masyarakat adat, ada friksi misalnya dari Masyarakat Adat Akur Cigugur Kuningan, yang pada awal

⁸⁷ <http://arcom.co.id/2013/08/14/menurut-eka-santosa-potensi-suara-partai-nasdem-di-boma-jabar-mencapai-7-juta-suara/> diunduh tanggal 15 September 2013 jam 23.45 WIB.

pembentukan Barisan Olot Tatar Sunda ikut terlibat, belakangan jarang melibatkan diri atau bahkan tidak tercantum dalam 22 Kasepuhan Masyarakat Adat yang tergabung dalam BOMA Jabar, termasuk juga Masyarakat Adat Dayak Bumi Sagandhu Indramayu. Demikianlah ujung perjalanan dari Duta Sawala Barisan Olot Tatar Sunda, Apakah dengan terlibat dalam Partai akan mampu memperjuangkan agenda-agenda masyarakat adat yang diangankan sejak awal. Atau akan mengalami kegagalan sebagaimana PARKI bagi Paguyuban Pasundan di Pemilu pertama. Bedanya kalau PARKI merupakan jelmaan dari Paguyuban Pasundan, sementara BOMA hanya sebagai partisan dari gelombang besar Partai Nasdem, yang mayoritas bukan masyarakat Sunda. Namun lebih bijaksana kalau kita tunggu kiprohnya.

BAB. V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada Bab. IV, maka secara sistematis peneliti dapat menyimpulkan beberapa pernyataan kesimpulan, sebagai berikut:

5.1.1. gejala politik identitas terutama akhir-akhir ini, lebih banyak dipengaruhi kepentingan politik praktis. Karena dasar kemajuan dalam ikatan persatuan dan kesatuan dalam “*nation*” tidak pernah tuntas dalam proses pendefinisian tentang identitas ke-Indonesia-an. Akibatnya akan selalu muncul fenomena merebaknya respon-respon kultural di sejumlah daerah dengan persoalan baru terkait munculnya identitas agama, atau etnisitas

5.1.2. Politik identitas tidak selalu dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan bangsa, melainkan ia dapat menjadi sebuah potensi untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui kemampuan untuk mengaplikasikan semangat Bhineka Tunggal Ika dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Identitas Sunda adalah identitas komunitas yang merujuk pada ‘komunitas adat Sunda’ yaitu digunakan untuk

kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur dan berusaha mempertahankan warisan masa lalu leluhur mereka di wilayah geografis tertentu, serta memiliki karakteristik-karakteristik sistem nilai, sosial, politik, ekonomi dan budaya yang khas dalam masyarakat Pasundan.

5.1.3. kebangkitan politik identitas Sunda, berkembang asumsi, bahwa dari segi kultural, ekonomi dan politik, yang sejak Orde Baru merasa terpinggirkan dari pentas politik pusat. Kini di era pasca reformasi mulai banyak tumbuh organisasi-organisasi social kemasyarakatan yang menampilkan diri sebagai representasi komunitas etnik Sunda untuk memperjuangkan hak-hak politik dan budaya masyarakat Sunda. Disamping juga faktor Masyarakat Sunda yang mulai kehilangan Jatidiri Sunda, pelan-pelan diserbu budaya baru yang cenderung egosentris, materialistis dan individualistis. Budaya baru yang menggerogoti sikap bersahabat, ramah dan terbuka dalam pergaulan Masyarakat Sunda.

5.1.4. Sebenarnya beberapa organisasi kesundaan sudah lahir sejak kemerdekaan, namun pasca reformasi semakin banyak bermunculan organisasi-organisasi kemasyarakatan dengan identitas kesundaan. Kalaupun

yang sudah lama berdiri, pasca reformasi berusaha berubah visi dan orientasinya, mulai memperbincangkan kembali tentang orientasi kekuasaan, terutama isu tentang kepemimpinan Sunda untuk pentas politik Indonesia. Data yang terdapat pada Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PPSS) ada sekitar 200 organisasi kesundaan di Jawa Barat, di antaranya ada yang berumur satu atau dua tahun lalu mati, ada juga yang puluhan, bahkan Paguyuban Pasundan menginjak usia 100 pada tahun 2013.

5.1.5. Paguyuban Pasundan dan Duta Sawala Barisan Olot Tatar Sunda merupakan dua organisasi kesundaan yang memiliki tujuan yang hamper sama namun memiliki cara dan karakter berbeda dalam perjuangannya, beberapa perbedaan misalnya:

Pertama, Paguyuban Pasundan merupakan organisasi yang dibentuk dari kalangan elit/menak yang diperuntukkan untuk mencerdaskan masyarakat Sunda, dan para aktifis organisasinya adalah kalangan elit/menak terdidik Sunda. Sedangkan Duta Sawala Barisan Olot Tatar Sunda merupakan organisasi yang dibentuk dari kalangan masyarakat Desa/Adat yang diwakili oleh elit tetua adat dan para aktifisnya komunitas adat yang

sebagian besar non akademisi, dan bertindak sebagai inisiatornya adalah agen/elit terdidik baik dari LSM maupun politisi.

Kedua, Paguyuban Pasundan merupakan organisasi kesundaan yang paling tua berdiri semenjak sebelum kemerdekaan, sangat berpengalaman dan sudah teruji kiprahnya baik dalam bidang politik, ekonomi dan social budaya. Sedangkan Duta Sawala Barisan Olot Tatar Sunda merupakan organisasi yang baru berdiri pada tahun 2010, terlahir pasca reformasi yang disinyalir sebagai era kebangkitan adat karena perasaan terpinggirkan apada era Orde Baru. Organisasi ini masih dalam rangka mencari bentuk dan strategi perjuangan.

Ketiga, Paguyuban Pasundan merupakan organisasi yang berkonsentrasi pada aspek pendidikan, dan pernah mengalami kegagalan ketika terlibat langsung dalam politik praktis (menjadi Partai). Namun demikian, masih memiliki pengaruh dalam mewacanakan mengenai kepemimpinan Sunda. Sedangkan Duta Sawala Barisan Olot Tatar Sunda, dalam proses pembentukan dan pencarian strategi perjuangannya langsung dihadapkan pada pilihan untuk berpolitik praktis dengan memilih untuk memperjuangkan hak-hak cultural masyarakat adat

melalui DPR RI, dengan pilihan Partai Nasdem sebagai kendaraan politiknya.

Yang menarik adalah keduanya sama-sama bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat Sunda.

5.2. Saran

Beberapa saran yang bisa peneliti sarankan berkaitan dengan penelitian dan pembinaan terhadap masyarakat Kampung Kuta, adalah sebagai berikut:

- 5.2.1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut di lapangan secara mendalam terkait dengan sejarah dan kiprah organisasi-organisasi Kesundaan mengenai prinsip-prinsip, nilai-nilai adat (sunda), dan strategi kebudayaan masing-masing organisasi untuk menjadikan kebudayaan Sunda benar-benar dihayati oleh masyarakat Sunda. Sehingga pelestarian adat, tidak sekedar dalam bentuk fisiknya saja, karena akan lebih mudah mengalami perubahan.
- 5.2.2. Juga perlu diadakan penelitian-penelitian oleh dinas-dinas pemerintah, yang berkait dengan pendidikan bahasa Sunda, seni dan sastra Sunda, termasuk seni kreatif untuk masyarakat adat. Sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan oleh dinas-dinas terkait dalam melakukan

pembinaan daerah, khususnya masyarakat Kampung Adat demi peningkatan kesejahteraan hidup secara umum.

5.2.3. Disarankan kepada pemerintah daerah agar tidak hanya melakukan pembinaan dalam pelestarian adat, demi kepentingan pariwisata saja. Namun perlu juga melakukan pembinaan masalah keagamaan, peningkatan pendidikan, peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan pembinaan dan pelestarian adat (Sunda) dan nilai-nilai kebudayaannya.

5.2.4. Khusus untuk pembinaan agama, disarankan bagi Perguruan Tinggi Islam, agar penelitian ini menjadi pertimbangan untuk dilakukannya pembinaan-pembinaan di masyarakat Kampung-kampung adat, bisa dijadikan pertimbangan menjadi lokasi Kuliah Kerja Nyata bagi mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anselm Strauss & Juliet Corbin. (2009). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. (Alih Bahasa Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien), Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Achmad Habib. (2004). *Konflik Antar Etnik di Pedesaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Abdul Rozak. (2005). *Teologi Kebatinan Sunda: Kajian Antropologi Agama tentang Aliran Kebatinan Perjalanan*. Bandung: PT. Kiblat.
- Ahmad Syafii Maarif, (2012) *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta: Democracy Project.
- Andrew Beatty. (1999). *Varieties of Javanese Religion: An Anthropological Account*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Andrew Beatty. (2001). *Variasi Agama Di Jawa : Suatu Pendekatan Antropologi*, (Alih Bahasa: Achmad Fedyani Saefudin). Jakarta: Murai Kencana.
- Annemarie de Waal Malefijt. (1968). *Religion and Culture An Introduction to Anthropology of Religion*. New York: the Macmillan Company.
- Bambang Pranowo. (2009). *Memahami Islam Jawa*. Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Brian Morris,, (1987). *Anthropological Studies of Religion: an Introductory Text*. Melbourne: Cambridge University press.
- Beverly Crawford and Ronnie D. Lipschutz. (Ed.). (1998). *The Myth of Ethnic Conflict”: Politics, Economics, and “Cultural” Violence*. University of California at Berkeley.
- Benedict R. O`G. Anderson. (2000). *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*, (alih bahasa: Revianto Budi Santoso). Yogyakarta: Mata Bangsa.

- Budi Susanto,S.J., (Ed.), (2003). *Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia*, Yogyakarta: Realino dan Kanisius.
- Budi Susanto,S.J., (Ed.). (2007). *Sisi Senyap Politik Bising*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Capt. R.P. Suyono. (2009). *Mistisisme Tengger*. Yogyakarta: LKiS.
- Cik Hasan Bisri, dkk. (Ed.). (2005). *Pergumulan Islam Dengan Kebudayaan Lokal di Tatar Sunda*. Cetakan Pertama. Bandung: Kaki Langit.
- Clifford Geertz.(1992). *Tafsir Kebudayaan*. (Alih bahasa: Francisco Budi Hardiman). Yogyakarta: Kanisius.
- Clifford Geertz. (1981). *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. (Alih bahasa: Aswab Mahasin). Jakarta: Pustaka Jaya.
- Clifford Geertz. (1976). *Involusi Pertanian di Indonesia: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, (Alih bahasa: S. Supomo). Jakarta: Bhratara K.A.
- Clifford Geertz. (1982). *Islam Yang Saya Amati: Perkembangan di Maroko dan Indonesia*, (Alih bahasa: Hasan Basari). Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Clifford Geertz. (1983). *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropologi*. USA: Basic Books, Inc.
- Clifford Geertz. (1992). *Penjaja dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia*, (alih bahasa: S. Supomo). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Clifford Geertz. (1998) *After The Fact: Dua Negeri, Satu Dasawarsa, Satu Antropolog*, (alih bahasa: Landung Simatupang). Yogyakarta: LKiS.
- Clifford Geertz. (2000). *Negara Teater: Kerajaan-Kerajaan di Bali Abad Kesembilan Belas*, (Alih bahasa: Hartono Hadi Kusumo). Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Dokumen Hasil Rapat Para Tokoh Komunitas Adat tanggal 2 Mei 2010 di Pasir Impun Bandung.
- Dokumen Hasil Pertemuan dengan Gubernur pada tanggal 23

- November 2010 di Gedung Sate Bandung.
- Edi S. Ekadjati, (2004) *Kebangkitan Kembali Orang Sunda: Kasus Paguyuban Pasundan 1913-1918*, Bandung: Kiblat.
- Elis Suryani NS., (2011). *Ragam Pesona Budaya Sunda*, Bogor: Penerbit Ghalia.
- Erni Budiwanti. (2000). *Islam Sasak: Wetu Telu versus Wetu Lima*. Yogyakarta: LKiS.
- Esther Kuntjara. (2006). *Penelitian Kebudayaan Sebuah Panduan Praktis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fiona Bowie (2001). *The Anthropology of Religion*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Hans J. Daeng, (2000). *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan: Tinjauan Antropologis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hans-Dieter Evers & Rudiger Korff. (2002). *Urbanisme di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-Ruang Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Harold R. Isaacs. (1993). *Pemujaan terhadap Kelompok Etnis: Identitas Kelompok dan Perubahan Politik*, judul asli: *Idols of the Tribe: Group Identity and Political Change* (Alih bahasa: Canisyus Maran). Jakarta: Yayasan Obor.
- Henk Schult Nordholt (ed.). (2005). *Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan*. Yogyakarta: LKiS.
- Henk Schult Nordholt dkk., (ed.). (2009). *Politik Lokal di Indonesia*, (Alih bahasa: Bernard Hidayat). Jakarta: Yayasan Obor.
- Heru Prasetya & Ingwuri Handayani (Ed.). (2010). *Agama dan Kebudayaan: Pergulatan di Tengah Komunitas*. Jakarta: Desantara Foundation.
- Hikmat Budiman dkk., (Ed.). (2009). *Hak Minoritas: Ethnos, Demos, dan Batas-batas Multikulturalisme*. Jakarta: The Interseksi.
- Irwan Abdullah. (2007). *Konstruksi dan Reproduksi*

- Kebudayaan*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irwan Abdullah, dkk. (Ed.). (2008). *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM & Pustaka Pelajar.
- Iwan Nugroho, (2011). *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jacques Bertrand. (2004). *Nationalism and Ethnic Conflict In Indonesia*. Cambridge: The Press Syndicate of The University of Cambridge.
- Jamie S. Davidson dkk., (Ed.). (2010). *Adat dalam Politik Indonesia*, (Alih bahasa: Emilius Ola K. & Nina Dwisasanti). Jakarta: Yayasan Obor & KITLV.
- Johan Iskandar, (2001). *Manusia, Budaya dan Lingkungan: Ekologi Manusia*, Bandung: Humaniora Utama Press.
- Jonathan Friedman. (1995). *Cultural Identity and Global Process*. London: Sage Publications.
- Jurnal Taswirul Afkar: Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Edisi No. 21 Tahun 2007.
- Jurnal Wawasan, Vol. 32, nomor 1, diterbitkan Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung, 2009.
- Koentjaraningrat. (1992). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Dian Rakyat.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2004). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Cetakan Kedua Puluh. Jakarta: Djambatan.
- Koentjaraningrat.(2007). *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta: UI Press.
- Koentjaraningrat. (2005). *Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kumpulan Kliping, *Surat Kabar Pikiran Rakyat*, tahun 2011-2012.
- Kusnaka Adimiharja, (1992). *Kasepuhan Yang Tumbuh di atas*

- Yang Luruh: Pengelolaan Lingkungan Secara Tradisional Di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat*, (Bandung: Tarsito,
- Kusnaka Adimihardja. (2008). *Dinamika Budaya Lokal*. Bandung: CV. Indra Prahasta & Pusat Kajian LBPB.
- Lawrence E. Harrison dan Samuel Huntington (ed.), (2011). *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, penterjemah: Retnowati, Cet.II, Jakarta: LP3ES.
- Lexy J. Meloeng. (1999). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mark Woodward. (1999). *Islam Jawa : Kesalehan Normatif versus Kebatinan*, judul asli: *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism*, (alih bahasa: Hairus Salim). Yogyakarta: LKiS.
- Miles dan Haberman, (1992), *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta: UI.
- Michael Lambek, (ed.), *A Reader in The Anthropology of Religion*, Blackwell Publishing, Australia, 2002.
- Michael R. Dove (1985). *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nengah Bawa Atmadja. (2010). *Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural dan Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Niels Mulder. (1998). *Misticism in Java: Ideology in Indonesia*. Singapore: The Pepin Press.
- Noerid Haloei Radam. (2001). *Religi Orang Bukit: Suatu Lukisan Struktur dan Fungsi dalam Kehidupan Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Yayasan Semesta.
- Norman K. Denzim & Yvonna S. Lincoln. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publications Inc.
- Nur Syam. (2010). *Agama Pelacur: Dramatugi Transendental*. Yogyakarta: LKiS.

- Nur Syam. (2005). *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS.
- Parsudi Suparlan. (1995). *Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing Dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Paul Stange. (2009). *Kejawen Modern: Hakekat dalam Penghayatan Sumarah*, (alih bahasa: Chandra Utama). Yogyakarta: LKiS.
- Peter L. Berger & Thomas Luckman,(1990). *The Sosial Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.
- P.W. Preston. (1997). *Political/Cultural Identity: Citizens and Nations in a Global Era*. London: SAGE Publications.
- Richard Butler & Tom Hinch (Ed.). (1996). *Tourism and Indigenous Peoples*. Boston: International Thompson Business Press.
- Robert W. Hefner. (1999). *Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*. (Alih bahasa: A Wisnuhardana & Imam Ahmad). Yogyakarta: LKiS.
- Robert W. Hefner. (2001). *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, (alih bahasa: Ahmad Baso). Jakarta: ISAI & Asia Foundation.
- R. Siti Zuhro, dkk., (Ed.). (2009). *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Ruth Bennedict. (1934). *Patterns of Culture*. England: Routladge & Kegan Paul Ltd.
- Republika, Senin 29 Januari 2001.
- Sandra Kartika & M. Mahendra (ed.). (1999). *Dari Keseragaman Menuju Keberagaman*. Jakarta: LSPP.
- Simuh. (2002). *Sufisme Jawa*, Cet.V. Yogyakarta: Bentang.
- Simuh. (1988). *Mistik Islam Kejawen Ronggo Warsito*. Jakarta: UI-Press.
- S. Nasution, (1995), *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*,

- Bandung: Tarsito.
- Sudjana, (1992), *Metode Statistika*, Bandung: Tarsito.
- Supratiknya. (1995). *Teori Perkembangan Kepercayaan: Karya-karya Penting James W. Fowler*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Tadjoer Ridjal Bdr. (2004). *Tamparisasi Tradisi Santri Pedesaan Jawa: Studi Kasus Interpretasi Identitas Wong Njaba, Wong Njero, dan Wong Mambu-Mambu*. Surabaya: Kampusina.
- Tania Murray Li, (2002). *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Taylor. Mark C. (Ed.). (1998). *Critical Terms for Religious Studies*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Thung Ju Lan dkk. (2006). *Klaim, Kontestasi & Konflik Identitas: Lokalitas vis-a-vis Nasionalitas*. Jakarta: LIPI Press.
- Thomas Hylland Eriksen. (1995). *Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives*, Cet.III. London: Pluto Press.
- Tim G. Babcock. (1989). *Kampung Jawa Tondano: Religion and Cultural Identity*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ubed Abdillah S., *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, (Magelang: Penerbit IndonesiaTera, 2002).
- Walter H. Capps. (1995). *Religious Studies The Making of a Discipline*. Minneapolis: Fortress.
- Yekti Maunati. (2006). *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, Cet. II. Yogyakarta: LKiS.
- Yudistira K Garna, (1992), *Teori-teori Perubahan Sosial*, Bandung: Program Pasca Sarjana UNPAD.

Web Site:

<http://regional.kompasiana.com/2013/07/09/4-organisasi-sunda->

[kiwari-575636.html](#) diunduh tanggal 13 September 2013 jam 20.40 WIB.

<http://damassukabumie.wordpress.com/category/tak-berkategori/> diunduh 13 September 2013 jam 19.38.

<http://www.bangadang.com/organisasi/bammus-sunda> diunduh 13 September 2013 jam 20.14 WIB.

<http://newspaper.pikiranrakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=165975> diunduh tanggal 11 september 2013 jam 20.29 WIB.

<http://aleut.wordpress.com/2011/08/25/sejarah-singkat-organisasi-kasundaan-part-1/> diunduh tanggal 12 September 2013 Jam 21.24 WIB

<http://www.bisnis-jabar.com/index.php/berita/3-tokoh-sunda-ini-dinilai-pantas-jadi-caprescawapres> diunduh tanggal 11 September 2013 jam 19.46 WIB.

<http://www.klikgalamedia.com/indexnews.php?wartakode=20090627163344&idkolom=beritautama> Diunduh tanggal 13 September 2013 jam 20.23 WIB.

<http://www.pikiran-rakyat.com/node/187237> diunduh Minggu, 15 September 2013 , jam 11.52 WIB.

<http://www.klik-galamedia.com/baresan-olot-tatar-sunda-kunjungi-redaksi-galamedia> diunduh 9 September 2013 jam 21.06 WIB.

<http://www.bisnis-jabar.com/index.php/berita/barisan-olot-tatar-sunda-kebijakan-kemenparekraf-tidak-tepat-sasaran> diunduh tanggal 10 September 2013 jam 20.11.

<http://www.bisnis-jabar.com/index.php/berita/barisan-olot-tatar-sunda-mengadu-kepada-surya-paloh> diunduh tanggal 10 September 2013 jam 19.51 WIB.

<http://www.dedeyusuf-laksamana.com/2013/01/lex-laksamana-dapat-gelar-kehormatan-dari-barisan-olot-tatar-sunda/> diunduh tanggal 09 September 2013 jam 19.08 WIB.

<http://m.merdeka.com/politik/dede-yusuf--lex-laksamana-mulai-dekati-tokoh-jabar.html> diunduh tanggal 9 September 2013 jam 21.39 WIB.

<http://arcom.co.id/2013/08/14/menurut-eka-santosa-potensi-suara-partai-nasdem-di-boma-jabar-mencapai-7-juta-suara/> diunduh tanggal 15 September 2013 jam 23.45 WIB.

